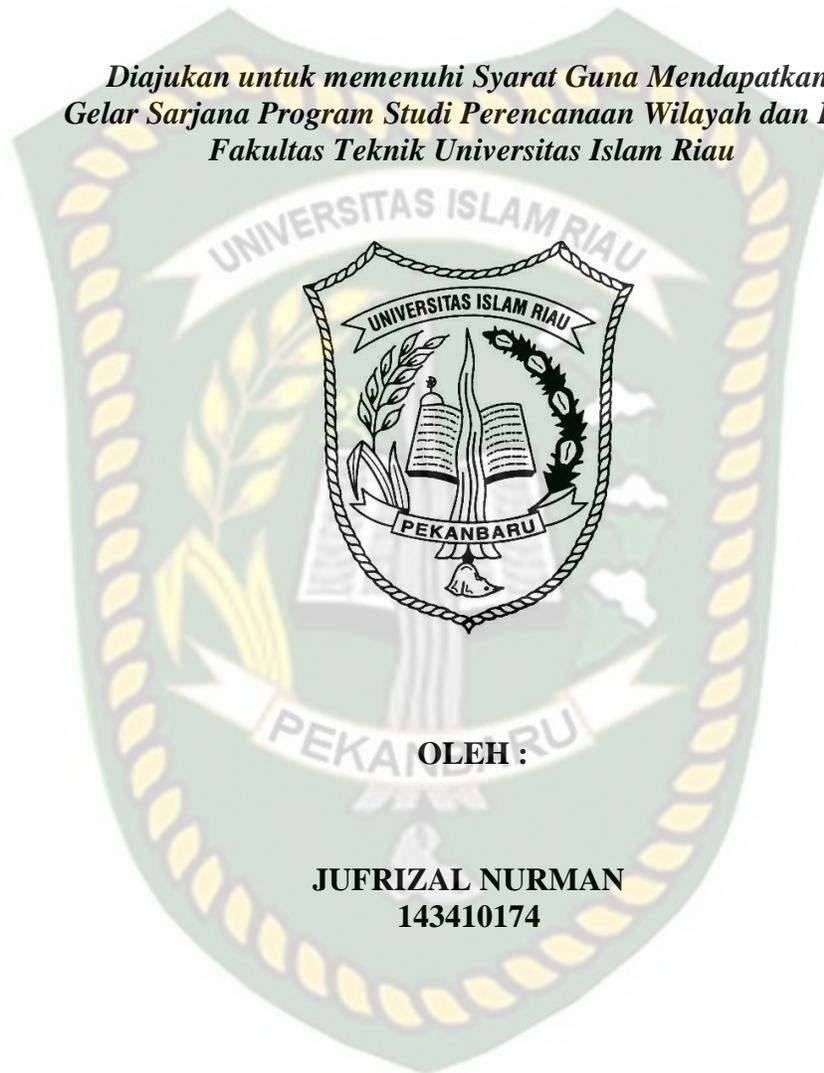


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA
MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelara Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH :

**JUFRIZAL NURMAN
143410174**

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

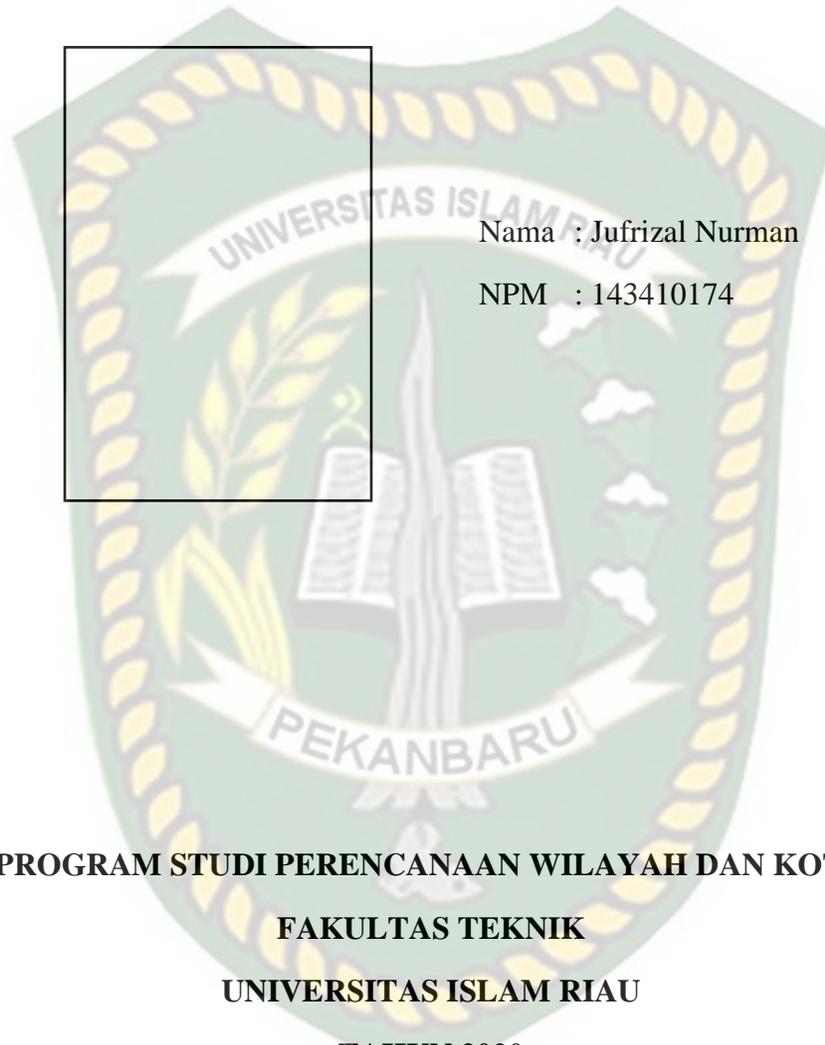
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA
MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Nama : Jufrizal Nurman

NPM : 143410174

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

JUFRIZAL NURMAN
NPM : 143410174

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Ir. H. FIRDAUS., MP

PEMBIMBING II



FAIZAN DALILLA, ST., M.Si

Disahkan Oleh :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK



Ir. H. ABDUL KUDUS ZAINI., MT

KETUA PROGRAM STUDI



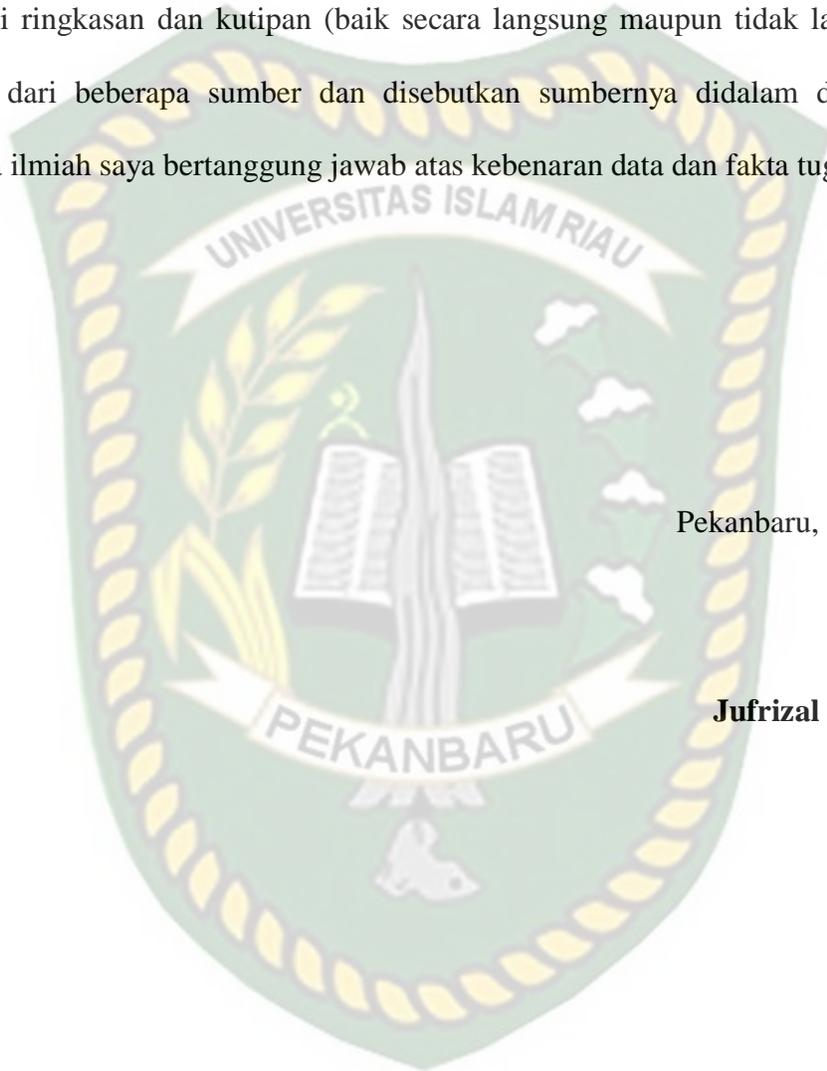
PUJI ASTUTI, ST., MT

SURAT PERNYATAAN

Saya mengakui bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali ringkasan dan kutipan (baik secara langsung maupun tidak langsung), saya ambil dari beberapa sumber dan disebutkan sumbernya didalam daftar pustaka. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan fakta tugas akhir ini.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Jufrizal Nurman



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**JUFRIZAL NURMAN
14340174**

ABSTRAK

Program DMIJ memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan desa. Program DMIJ dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri agar lebih ikut serta dalam proses pelaksanaan Program DMIJ untuk dapat melaksanakan pembangunan di desa masyarakat itu menempati tempat tinggal. Untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai tujuan terdapat 2 (dua) sasaran penelitian yaitu teridentifikasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh dan diketahui tingkat partisipasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Reteh. Tingkat partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Sherry Arnstein (1969).

Program DMIJ yang sudah terlaksana di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terbagi dalam 2 (dua) bidang pembangunan desa, yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan masyarakat desa. Hasil analisis yang telah peneliti lakukan untuk tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berada pada tingkat ketiga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat informasi (*informing*). Sedangkan Pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh berada pada tingkat partisipasi sedang. Dimana masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa terutama dalam melakukan gotong royong untuk pembangunan di desa.

Kata Kunci : Program DMIJ, Partisipasi Masyarakat, Kecamatan Reteh

**PUBLIC PARTICIPATION IN IMPLEMENTATION PROGRAM DESA
MAJU INHIL JAYA (DMIJ) RETEH SUBDISTRICT
INDRAGIRI HILIR REGENY**

**JUFRIZAL NURMAN
14340174**

ABSTRACT

The DMIJ program aims to provide legal guarantees and certainty to the rights and obligations of everyone to be involved and involved in the process of managing village development. The DMIJ program is implemented with a community empowerment approach, and for this reason it is hoped that community awareness itself will be more involved in the process of implementing the DMIJ Program in order to be able to carry out development in the village where the community lives. To find out the success of development programs and efforts to improve the welfare of rural communities is largely determined by the participation of the community.

This study aims to determine the level of community participation in the implementation of the Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) in Reteh District, Indragiri Hilir Regency. To achieve the objectives, there are 2 (two) research objectives, namely the DMIJ Program identified in Reteh District and the level of participation of the DMIJ Program in Reteh District, Indragiri Hilir Regency. This research uses qualitative and quantitative analysis methods. Qualitative analysis was used to identify the DMIJ Program in Reteh District. Quantitative analysis is used to measure the level of community participation in Reteh District. The level of participation used in this study is based on theory Sherry Arnstein's (1969).

The DMIJ program that has been implemented in Reteh Subdistrict, Indragiri Hilir Regency is divided into 2 (two) areas of village development, namely the implementation of village development and the field of village community development. The results of the analysis that researchers have done for the level of community participation in the planning of the Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) are at the third level of the eight steps of Arnstein's participation which is at the information level (informing). Whereas At the level of community participation in the implementation of the DMIJ Program in Reteh District is at a moderate level of participation. Where the community has been involved in the implementation of development in the village, especially in carrying out mutual cooperation for development in the village.

Keywords:; DMIJ Program, Community Participation, Reteh District

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk program Strata-1 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi S.H M.C.I selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Ir. H.Abdul Kudus Zaini, ST, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
4. Bapak Muhammad Sofwan, ST, MT selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Ir. Firdaus Agus, MP selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu) yang telah banyak memberikan dorongan dalam membimbing juga memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak Faizan Dalilla, ST, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 (Dua) yang memberikan arahan juga dorongan yang berharga kepada penulis tugas akhir.
7. Kepada Staf Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
8. Kepada Ayahanda Hermanses dan Ibunda Nursimah yang saya cintai dan sayangi tidak hentinya memberikan dukungan moril dan materil. Serta, nasihat juga motivasi hingga saat ini penulis tetap kuat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Kakanda Nurman Aprialdi dan Adinda An nisaa Hermasari yang selalu memberikan motivasi dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Rekan seperjuangan Planologi angkatan 2014 A yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Demikian dengan selesainya Tugas Akhir ini, peneliti mengharapkan semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

Jufrizal Nurman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Sasaran Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah	8
1.6.2. Ruang Lingkup Materi	10
1.7. Kerangka Berpikir	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORI	14
2.1. Konsep Dasar Partisipasi.....	14
2.1.1. Pengertian Partisipasi	14
2.1.2. Bentuk Partisipasi.....	15
2.1.3. Macam-macam Partisipasi	16
2.1.4. Persyaratan Partisipasi.....	17
2.1.5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	19
2.1.6. Kegunaan Peran Serta Masyarakat	25
2.2. Partisipasi Masyarakat Menurut Pandangan Islam.....	26
2.3. Perencanaan Pembangunan Desa	27
2.3.1. Pengertian Desa.....	27

2.3.2. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan	28
2.3.3. Prinsip Perencanaan Desa	29
2.4. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)	31
2.4.1. Kegiatan-Kegiatan Program DMIJ	34
2.5. Keterkaitan Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota	36
2.6. Sintesa Teori	38
2.7. Peneliti Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Metode Penelitian	42
3.2. Jenis Data	43
3.2.1. Data Primer	43
3.2.2. Data Sekunder	43
3.3. Populasi dan Sampel	44
3.3.1. Populasi	44
3.3.2. Sampel	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.5. Tahap Penelitian	47
3.5.1. Tahap Persiapan	47
3.5.2. Waktu Penelitian	48
3.5.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	49
3.5.4. Bahan dan Alat Penelitian	49
3.5.5. Tahap Analisis	49
3.6. Desain Penelitian	53
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	55
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	55
4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir	55
4.1.2. Topografi Wilayah	60
4.1.3. Geologi	64
4.1.4. Hidrologi	67
4.1.5. Klimatologi	67

4.1.6. Jenis Tanah.....	68
4.1.7. Penggunaan Lahan	70
4.1.8. Kependudukan.....	71
4.1.9. Aspek Sosial.....	72
4.1.9.1. Pendidikan	73
4.1.9.2. Kesehatan	73
4.1.9.3. Keagamaan	74
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Reteh.....	76
4.2.1. Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Reteh	76
4.2.2. Keadaan Alamnya	80
4.2.3. Kependudukan Kecamatan Reteh	81
4.2.4. Sosial	84
4.2.4.1. Pendidikan	84
4.2.4.2. Kesehatan	85
4.2.4.3. Keagamaan	86
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
5.1. Mengidentifikasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh	88
5.1.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	88
5.1.1.1. Pembangunan Jalan.....	88
5.1.1.2. Pembangunan Jembatan	95
5.1.1.3. Pembangunan Tanggul	99
5.1.1.4. Pembuatan Sumur Bor.....	102
5.1.1.5. Pembangunan Sarana Desa	104
5.1.2. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	107
5.1.2.1. Program Posyandu	107
5.1.2.2. Program Magrib Mengaji	111
5.1.2.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	114
5.2. Analisis Tingkat Partisipasi.....	117
5.2.1. Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan	117
5.2.1.1. Partisipasi Kehadiran dalam Musyawarah Desa.....	117

5.2.1.2. Partisipasi dalam Mengemukakan Masukan/Saran/Usul.....	121
5.2.1.3. Partisipasi dalam Menetapkan Konsep Rencana	124
5.2.1.4. Partisipasi Memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Rencana.....	127
5.2.1.5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Keseluruhan	130
5.2.2. Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan.....	133
5.2.2.1. Partisipasi dalam Bentuk Uang atau Benda	134
5.2.2.2. Partisipasi dalam Bentuk Pikiran atau Ide.....	137
5.2.2.3. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga (Gotong Royong)	140
5.2.2.4. Partisipasi dalam Pelaksanaan Keseluruhan	143
BAB VI PENUTUP	145
6.1. Kesimpulan.....	145
6.2. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Peran dan Kegunaan Partisipasi Masyarakat	26
Tabel 2.2.	Sintesa Teori	38
Tabel 2.3.	Peneliti Terdahulu.....	39
Tabel 3.1.	Jumlah Sampel Penelitian Berdasarkan Desa di Kecamatan Reteh	46
Tabel 3.2.	Kategori Tingkatan Partisipasi.....	50
Tabel 3.3.	Skoring Tingkatan Partisipasi dalam Perencanaan	52
Tabel 3.4.	Skoring Tingkatan Partisipasi dalam Pelaksanaan	53
Tabel 3.5.	Desain Penelitian	54
Tabel 4.1.	Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017	56
Tabel 4.2.	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017	58
Tabel 4.3.	Ketinggian Wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan	61
Tabel 4.4.	Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017	68
Tabel 4.5.	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017	70
Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017.....	72
Tabel 4.7.	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017	73
Tabel 4.8.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017	74

Tabel 4.9.	Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017	75
Tabel 4.10.	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh 2016	77
Tabel 4.11.	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2015 dan 2016	82
Tabel 4.12.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016	83
Tabel 4.13.	Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016	84
Tabel 4.14.	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016	85
Tabel 4.15.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016	86
Tabel 4.16.	Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016.....	87
Tabel 5.1.	Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2015	89
Tabel 5.2.	Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2016	91
Tabel 5.3.	Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2017	93
Tabel 5.4.	Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2015	96
Tabel 5.5.	Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2016	97
Tabel 5.6.	Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2017	97
Tabel 5.7.	Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2015	100

Tabel 5.8. Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2016	100
Tabel 5.9. Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2017	101
Tabel 5.10. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2015	102
Tabel 5.11. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2016	103
Tabel 5.12. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2017	103
Tabel 5.13. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2015	104
Tabel 5.14. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2016	105
Tabel 5.15. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2017	106
Tabel 5.16. Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2015	108
Tabel 5.17. Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2016	109
Tabel 5.18. Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2017	110
Tabel 5.19. Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2015	111
Tabel 5.20. Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2016	112
Tabel 5.21. Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2017	113
Tabel 5.22. Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2015	114
Tabel 5.23. Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2016	115
Tabel 5.24. Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2017	116

Tabel 5.24.	Partisipasi Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa.....	118
Tabel 5.25.	Tingkatan Partisipasi Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa.....	119
Tabel 5.26.	Skoring Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan.....	120
Tabel 5.27.	Partisipasi Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/usul.....	122
Tabel 5.28.	Tingkat Partisipasi Keaktifan Mengemukakan Masukan/ Saran/Usul.....	123
Tabel 5.29.	Partisipasi Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana	125
Tabel 5.30.	Tingkat Partisipasi Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana	126
Tabel 5.31.	Partisipasi Keterlibatan Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Rencana.....	128
Tabel 5.32.	Tingkat Partisipasi Keterlibatan Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Rencana	129
Tabel 5.33.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh.....	131
Tabel 5.34.	Skoring Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan Keseluruhan	132
Tabel 5.35.	Persentase Penilaian Partisipasi Uang atau Benda.....	135
Tabel 5.36.	Nilai Skor Tingkat Partisipasi Uang atau Benda	136
Tabel 5.37.	Skoring Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan	137
Tabel 5.38.	Persentase Penilaian Partisipasi Pikiran atau Ide.....	138
Tabel 5.39.	Nilai Skor Tingkat Partisipasi Pikiran atau Ide	139
Tabel 5.40.	Persentase Penilaian Partisipasi Tenaga (Gotong Royong)	141

Tabel 5.41. Nilai Skor Tingkat Partisipasi Tenaga (Gotong Royong)	141
Tabel 5.42 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh	143
Tabel 5.43 Skoring Tingkatan Partisipasi dalam Pelaksanaan Keseluruhan	144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Adminstrasi Kecamatan Reteh.....	9
Gambar 1.2.	Kerangka Berpikir.....	11
Gambar 2.1.	Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat	19
Gambar 4.1.	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017	57
Gambar 4.2.	Peta Adminstrasi Kabupaten Indragiri Hilir	59
Gambar 4.3.	Peta Topografi Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
Gambar 4.4.	Peta Geologi Kabupaten Indragiri Hilir.....	66
Gambar 4.5.	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017.....	71
Gambar 4.6.	Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh (KM ²), 2016.....	78
Gambar 4.7.	Peta Adminstrasi Kecamatan Reteh.....	79
Gambar 5.1.	Pembangunan Jalan di Desa Sungai Asam	95
Gambar 5.2.	Pembangunan Jembatan di Desa Sungai Undan.....	99
Gambar 5.3.	Pengadaan Tanggul di Desa Sungai Mahang	102
Gambar 5.4.	Pembangunan Sarana Kantor Desa Pulau Ruku	106
Gambar 5.5.	Program Posyandu di Kecamatan Reteh.....	110
Gambar 5.6.	Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh	113
Gambar 5.7.	Program PAUD di Kecamatan Reteh	116
Gambar 5.8.	Masyarakat desa Sungai Mahang Melakukan Gotong Royong.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang yang mendiami suatu wilayah atau negara tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik. Pelaksanaan partisipasi adalah usaha masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri (Wicaksono dan Sugiarto dalam Sukran Mupid, 2016).

Di negara Indonesia sistem pemerintahan dilaksanakan secara demokratis, partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan hakikat demokratis sebagai pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Conyers (1994) dalam Suciati (2006) menjelaskan bahwa partisipasi dalam masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, keterlibatan masyarakat membuat masyarakat itu memercayai sebuah program pembangunan jika dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan hak demokratis dalam sebuah program pembangunan yang masyarakat itu sendiri ikut dilibatkan untuk ikut serta

dalam memberikan masukan ataupun usulan dalam menentukan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Indragiri Hilir merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Riau. Luas Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 18.812 Km² yang terdiri dari wilayah daratan 11.605,97 Km², wilayah perairan umum 888,97 Km² dan perairan laut 6.318 Km². Secara geografis Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan letak antara 0⁰36' Lintang Utara dan 1⁰07' Lintang Selatan, dan antara 104⁰10' - 102⁰32' Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah Barat, Kabupaten Pelalawan di sebelah Utara, Provinsi Kepulauan Riau di Sebelah Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di sebelah Selatan.

Beratnya kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir, dengan kesulitan dan luasnya wilayah, jumlah penduduk yang relatif besar, serta minimnya alokasi anggaran yang diterima dari pusat membuat sulitnya dalam melaksanakan pembangunan terutama di desa-desa Kabupaten Indragiri Hilir ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka Bupati Indragiri Hilir pada awal pemerintahan tahun 2014 langsung menyusun suatu program yaitu Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ). (Resume DMIJ Kabupaten Indragiri Hilir, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di maksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program DMIJ telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Program ini merupakan Program pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif .

Program DMIJ memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan desa. Adapun tujuan khusus Program DMIJ meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan, dan pembangunan desa. Untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri agar lebih ikut serta dalam proses pelaksanaan Program DMIJ.

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 724.75 Km² atau 72.475 Ha. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu kelurahan pulau kijang dengan jarak ke Kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 Km. Kecamatan Reteh terletak pada hamparan di bagian utara Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Batang, sebelah selatan dengan Kabupaten dengan

Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang, sebelah timur dengan Selat Berhala.

Kecamatan Reteh melaksanakan DMIJ untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan Reteh. Kecamatan Reteh memiliki 11 (sebelas) desa yang tercatat untuk mengikuti Program DMIJ yaitu Desa Sanglar, Desa Pulau Kecil, Desa Sungai Undan, Desa Sungai Terab, Desa Seberang Sanglar, Desa Mekar Sari, Desa Sebrang Pulau Kijang, Desa Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan Tanjung Labuh. Kondisi geografis pada umumnya di setiap desa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari hal ini diakibatkan kondisi jalan yang belum merata pembangunannya hingga saat ini sangat sulit untuk dilalui terlebih lagi saat musim hujan. Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur *trayek* tetap untuk transportasi laut, sehingga harus menyewa *Boot/pompong* jika akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu Desa Sungai Terab, Desa Sungai Asam, Desa Pulau Ruko, Desa Sungai Mahang, dan Desa Tanjung Labuh. (Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017).

Kecamatan Reteh juga memiliki sektor perekonomian yang mendukung kebutuhan masyarakat. Desa-desa di Kecamatan Reteh pada umumnya bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan. Pada desa yang berada di pinggiran sungai mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang berbeda-beda untuk mendukung mata

pencarian penduduk di desa-desa mereka tinggal dan membuat peneliti ingin meneliti partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk desanya sendiri.

Untuk mengetahui keberhasilan Program Pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan adanya program pemberdayaan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberhasilan program DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir belum diketahui, untuk mengukur keberhasilan program DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh perlu adanya peran serta masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan dalam melaksanakan Program DMIJ, penelitian ini akan melihat keberhasilan Program DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan Program DMIJ. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program DMIJ di Kecamatan Reteh. Dari permasalahan diatas untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa Program DMIJ memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses

pengelolaan pembangunan desa. Pada Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Program DMIJ belum banyak terlihat hasil pembangunan yang di laksanakan di masing-masing desa di Kecamatan Reteh. Dalam pelaksanaan Program DMIJ perlu adanya pendekatan pemberdayaan masyarakat, untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri agar lebih ikut serta dalam proses pelaksanaan Program DMIJ untuk dapat melaksanakan pembangunan di desa masyarakat itu menempati tempat tinggal.

Untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan adanya program pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberhasilan program DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir belum diketahui, untuk mengukur keberhasilan program DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh perlu adanya peran serta masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan Program DMIJ.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian/*research question* yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Apa saja Program DMIJ yang terlaksana di Kecamatan Reteh ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu dari latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sasaran Penelitian

Adapun sasaran penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Teridentifikasinya program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Diketuainya tingkat partisipasi masyarakat dalam program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat di Kecamatan Reteh dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk desa.
- b. Diharapkan berguna bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan tindakan apa yang di ambil untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa-desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Diharapkan berguna bagi peneliti dalam memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam studi penelitian ini, ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup Wilayah bertujuan untuk membatasi wilayah kajian, sedangkan ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi materi pembahasan.

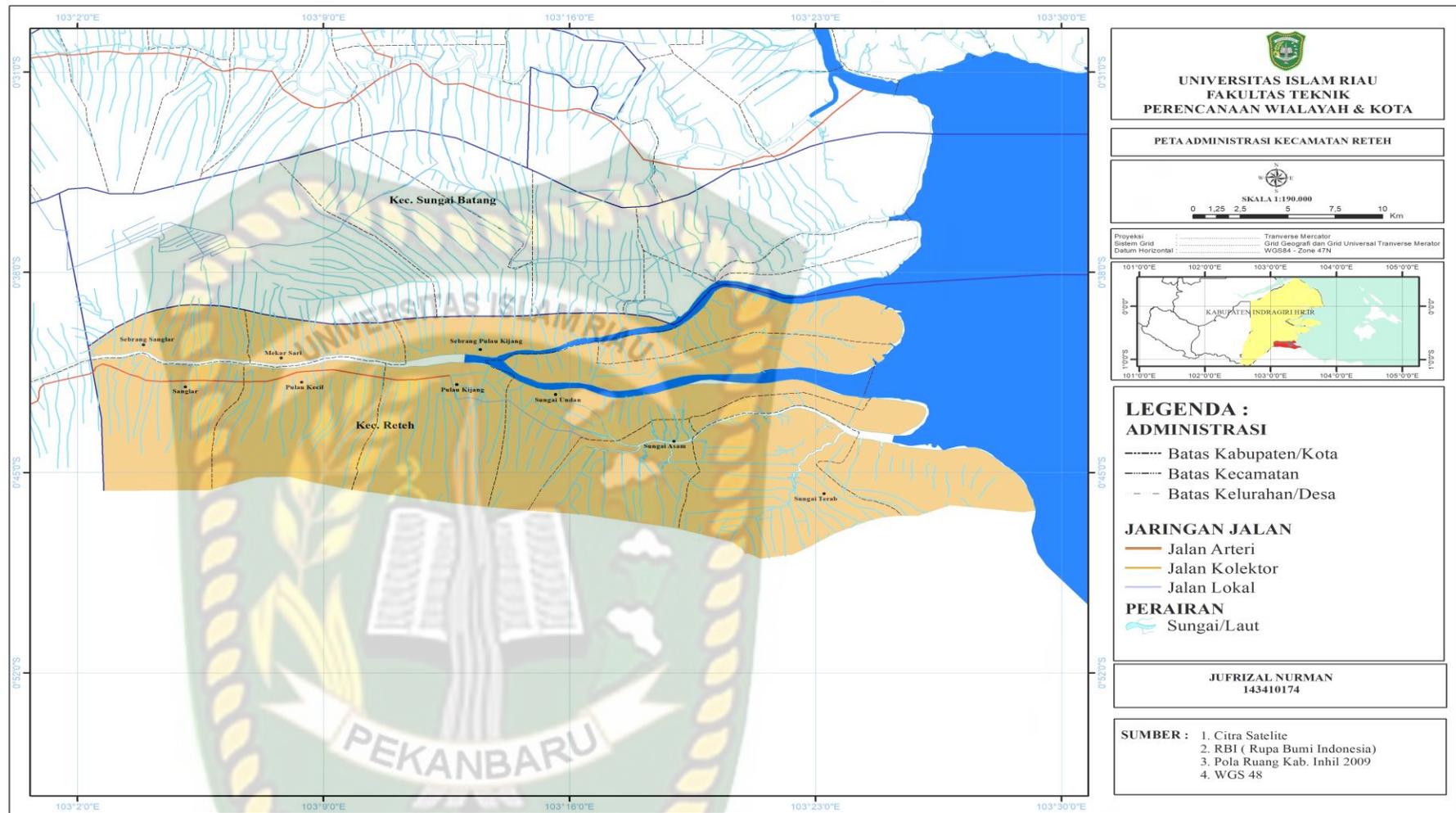
1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini berada pada desa-desa yang ada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah $\pm 724.75 \text{ Km}^2$ atau $\pm 72.475 \text{ Ha}$. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu Kelurahan Pulau Kijang dengan jarak Kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 Km. Kecamatan Reteh terletak pada hamparan di bagian utara Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Batang.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang.
4. Sebelah Timur dengan Selat Berhala.

Adapun desa-desa yang ada di Kecamatan Rethel sebanyak 11 (Sebelas) desa yaitu Desa sanglar, pulau kecil, sungai undan, sungai terab, seberang sanglar, mekar sari, seberang pulau kijang, sungai asam, pulau ruku, sungai mahang, tanjung labuh.





Gambar 1.1. Peta Administrasi Kecamatan Reteh

1.6.2. Ruang Lingkup Materi

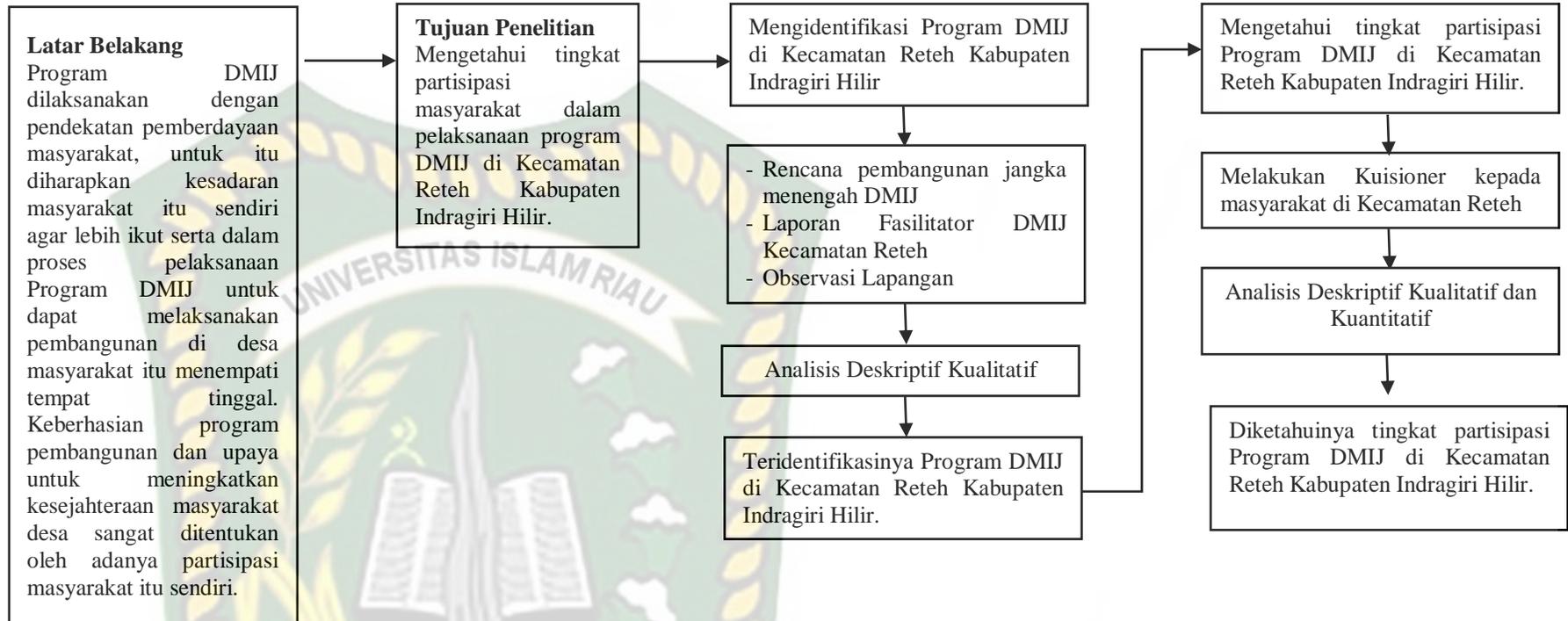
Ruang lingkup materi dari penelitian ini akan membahas mengenai pembangunan partisipatif, yaitu :

1. Konsep dasar partisipasi.
2. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Tingkatan partisipasi dalam pembangunan.

Serta materi yang terkait dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh.



1.7. Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Analisis, 2019

1.8. Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian ini dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teori

Bab ini mengemukakan tentang pengertian umum terkait pembahasan dalam penelitian ini, yaitu konsep dasar partisipasi meliputi pengertian partisipasi, bentuk partisipasi, macam-macam partisipasi, tingkatan partisipasi masyarakat, dan kegunaan peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pandangan islam, perencanaan pembangunan desa prinsip perencanaan desa, penjelasan tentang program DMIJ, sintesa teori, dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan pendekatan metode penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, tahap penelitian dan desain penelitian.

Bab IV : Gambaran Umum Wilayah

Bab ini berisikan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, gambaran umum wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Reteh.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan di bahas pada bab ini, berisikan tentang hasil penelitian yang telah di lakukan yaitu identifikasi program DMIJ di Kecamatan Reteh dan Analisis tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ini maupun untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Partisipasi

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Menurut Mikkelsen (2005) dalam Yendri (2015) partisipasi biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri (Mikkelsen, 2005).

Oakley (1991) dalam Mwiru (2015) umumnya melihat partisipasi sebagai proses aktif dimana penerima manfaat atau kelompok mempengaruhi arah dalam pelaksanaan proyek pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam hal pendapatan, pertumbuhan pribadi, kemandirian, atau yang mereka hargai.

Terdapat tiga unsur penting dalam partisipasi :

- a. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Kesiediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- c. Unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa *sense of belongingness*.

2.1.2. Bentuk Partisipasi

Menurut Suciati (2006), bentuk-bentuk partisipasi dalam perencanaan meliputi :

- (1) Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan
- (2) Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul

(3) Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana.

(4) Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.

Menurut Teesen, bentuk-bentuk partisipasi dalam pelaksanaan meliputi :

(1) Partisipasi dalam bentuk uang atau benda.

(2) Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide.

(3) Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong).

Berdasarkan bentuk partisipasi tersebut, maka dapat diklasifikasikan skala yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat partisipasi dalam perencanaan Program DMIJ adalah bentuk partisipasi menurut Suciati (2006). Hal ini karena bentuk partisipasi yang digunakan sesuai untuk menetapkan sebuah program dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan Program DMIJ adalah bentuk partisipasi menurut Tessen.

2.1.3. Macam-macam Partisipasi

Menurut Siti Irene (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan *keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara

lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi : menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa persentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh, partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.4. Persyaratan Partisipasi

Menurut Mikkelsen (2005) dalam Yendri (2015) persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Untuk dapat berpartisipasi waktu. Waktu yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pimpinan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui

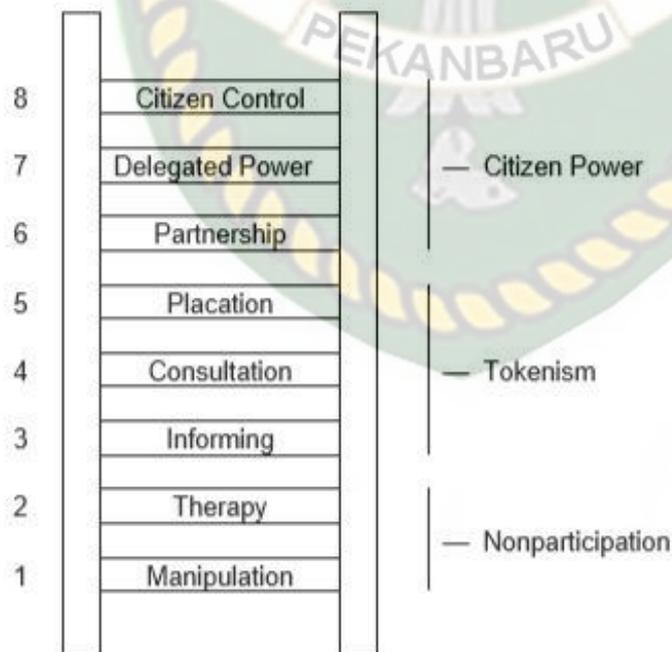
komunikasi yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa/pimpinan yang disebut komunikator dan penerima pesan komunikan. Pesan itu disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti, lambang itu harus dapat saling dimengerti dan dipahami. Penyebaran pesan dilakukan melalui sarana dan sebagainya sehingga komunikasi dapat menerima dan menafsirkannya serta memahami apa yang dimaksud oleh komunikator.

- b. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan, yang akan menimbulkan efek negatif.
- c. Subyek partisipasi adalah hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/interusnya.
- d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki ruang lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator dan walaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator.
- e. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga terciptanya pertukaran pikiran yang efektif/berhasil.
- f. Para pihak yang bersangkutan bebas didalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- g. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

2.1.5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Sherry Arnstein (1969) dalam Suciati (2006) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American institute of planners* dengan judul “ *A Ladder of citizen participation*”, bahwa terdapat 8 (delapan) tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.



Sumber : Suciati, 2006

Gambar 2.1. Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat

Delapan tangga tingkat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Manipulasi termasuk pada tingkatan dari Anstein yang paling rendah, masyarakat hanya digunakan untuk persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi diselewengkan sebagai alat untuk publikasi dari pihak penguasa.

2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimana anggota masyarakat hanya di perlakukan seperti melakukan penyembuhan pasien dalam terapi. Masyarakat ini sudah terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak mendapat keuntungan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (Informasi)

Partisipasi pada tahap informasi masyarakat diberikan informasi terkait hak-hak mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan. Dalam tahap informasi ini yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat, pada tahap informasi kemungkinan masyarakat akan sedikit sekali untuk mempengaruhi rencana kegiatan. Hal ini terjadi karena informasi yang diberikan biasanya pada akhir perencanaan.

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengan pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (Penenteraman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhan, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (Kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam pemecahan berbagai masalah. Sehingga telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan)

Masyarakat telah diberi limpahan wewenang untuk memberikan keputusan pada rencana atau program tertentu. Pemegang kekuasaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tawar menawar dengan masyarakat. Wewenang yang telah diberikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan terhadap rencana itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Pada tingkat kontrol masyarakat ini adalah masyarakat diberikan kekuatan untuk mengatur sebuah program atau kelembagaan terkait kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat bernegosiasi kepada pihak luar untuk melakukan perubahan. Pada tingkat ini masyarakat langsung berkaitan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan tanpa melalui pihak ketiga dan masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sebuah program yang dibuatnya.

Menurut Arnstein, peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan

bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat tipologi partisipasi diatas, Arnstein menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (*empty ritual*) dengan bentuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (*Real Power*) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses. Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “Non peran serta” , dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan (1) terapi dan (2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berperan serta. Tangga ketiga, keempat, dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah (3) penyampaian informasi (*Informing*), (4) Konsultasi, dan (5) Peredaman Kemarahan (*Placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat “Kekuasaan Masyarakat” (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) Kemitraan (*Partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi (7) Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) dan (8) Pengawasan masyarakat (*Citized Control*). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (*non elite*)

memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijakan tertentu.

Sedangkan menurut Goethert (1998) dalam Suciati (2006) membagi 5 tingkat partisipasi yaitu:

1. *None*, artinya bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. *Information or Indirect*, sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. *Consultation*, pemerintah mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
4. *Shared Control*, masyarakat dan pemerintah berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. *Full Control*, masyarakat mendominasi dan pemerintah membantu ketika diperlukan.

Sedangkan menurut (Chapin dalam Slamet, 1993) ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengukur tingkatan partisipasi, yaitu:

- a. Keanggotaan organisasi
- b. Kehadiran pertemuan
- c. Sumbangan-sumbangan
- d. Keanggotaan di kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di kepengurusan

Sementara Goldhamer (dalam Slamet, 1993) mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu:

- a. Jumlah asosiasi yang akan dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki

dari beberapa tingkatan partisipasi diatas, yang memegang skala partisipasi dalam menentukan skala partisipasi yang lainya adalah tangga partisipasi menurut Sherry Arnstein, dimana tangga partisipasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya kekuasaan yang telah diberikan kepada masyarakat. Untuk itu yang digunakan peneliti dalam mengukur tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh menggunakan 8 tangga partisipasi Sherry Arnstein.

2.1.6. Kegunaan Peran Serta Masyarakat

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*Public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Canter, 1977) dalam Muta'ali (2013). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest group*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan

kelompok tersebut dan menggunakannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor. Beberapa peran dan kegunaan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. 1. Peran dan Kegunaan Partisipasi Masyarakat

Peran	Kegunaan
Peran suatu masyarakat sebagai suatu kebijakan.	Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
Peran serta masyarakat sebagai strategi.	Meningkatkan proses belajar
Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi	Mengeliminir perasaan terasingkan
Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa.	Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
Peran serta masyarakat sebagai terapi	Menciptakan kesadaran politik.
	Keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
	Menjadi sumber dari informasi yang berguna.
	Merupakan komitmen sistem demokrasi.

Sumber : Muta'ali (2013).

2.2. Partisipasi Masyarakat Menurut Pandangan Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari*

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisaa : 59).

Dalam penelitian ini, seperti yang diartikan surah An-Nisaa ayat 59 bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Selain itu, kaum muslim juga di perintahkan taat kepada *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan). Sehingga sudah seharusnya masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap program-program yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini, Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan program pembangunan masyarakat untuk desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam surah Asy-Syura ayat 38 dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah urusan dengan cara musyawarah antara mereka.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - ٣٨

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Qs. Asy-Syura 38).*

2.3. Perencanaan Pembangunan Desa

2.3.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di maksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Daljoeni (2003) dalam Yendri (2015) desa merupakan permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Desa dengan berbagai karakteristik fisik maupun sosial, memperlihatkan adanya kesatuan diantara unsur-unsurnya.

Menurut Bintaro (1977) bahwa wilayah perdesaan merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya. Adapun secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dusun yang digabungkan, sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

Menurut Muta'ali (2013) Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2.3.2. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Lutfi, 2013 dalam Yendri, 2015).

Berkaitan dengan model pembangunan desa, Undang-undang No 6 Tahun 2014 desa memberikan pembedaan pengertian antara pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan desa diartikan sebagai usaha peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan kawasan pedesaan adalah pembangunan yang dilakukan pada areal kawasan pedesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Muta'ali, 2013).

Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam suatu Kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan pedesaan juga relevan dan sinergis dengan gagasan undang-undang penataan ruang yang menetapkan pembangunan kawasan pedesaan sebagai kawasan agropolitan yang bersifat lintas desa.

2.3.3. Prinsip Perencanaan Desa

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus di dasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Lutfi, 2013 dalam Yendri, 2015) :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh masyarakat desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah didesa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal diberlakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
- k. Penggalan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan (Lutfi, 2013).

2.4. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Program DMIJ adalah program pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

Prinsip-prinsip Program DMIJ adalah desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transparan, efektif dan efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan umum Program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.

Tujuan Khusus Program DMIJ adalah untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan, dan pembangunan desa.
- b. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa.
- c. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan.
- d. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana prasarana pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat.
- f. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta intensif atau operasional kelembagaan desa.
- g. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar yang diprioritaskan masyarakat.
- h. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up.
- i. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa.
- j. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan.
- k. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.

- l. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan.
- m. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.
- n. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Ruang lingkup pengaturan tentang Program DMIJ terdiri dari :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Tipologi Desa.
- d. Mekanisme Program.
- e. Pendanaan.
- f. Pertanggungjawaban Dana.
- g. Peran pemerintah daerah.
- h. Pendampingan
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- j. Sistem informasi.

Pengelompokkan desa berdasarkan kondisi untuk mengatur perkembangan desa digunakan klasifikasi atau tipologi desa. Tipologi desa digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan :

- a. Desa Swadaya
- b. Desa Swakarsa
- c. Desa Swasembada
- d. Desa Maju.

2.4.1. Kegiatan-Kegiatan Program DMIJ

Kegiatan program DMIJ meliputi seluruh sistem perencanaan dan pelaksanaan pemabangunan desa. Kegiatan pembangunan desa melalui program DMIJ berdasarkan prioritas kebutuhan desa dan masyarakat desa antara lain meliputi :

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung pertanian masyarakat.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung perkebunan masyarakat.
- c. Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi desa dan antar desa, jalan pendukung pertanian, jalan produksi,
- d. Penyediaan prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan dan kesehatan.
- f. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan.
- g. Penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa.
- h. Perbaikan lingkungan desa.
- i. Pembangunan dan perbaikan drainase.
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
- k. Pengembangan prasarana dan sarana produksi di desa.

- l. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa.
- m. Pendirian dan pengembangan BUM desa
- n. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa.
- o. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan.
- p. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.
- q. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- s. Pengembangan benih lokal.
- t. Pengembangan ternak secara kolektif.
- u. Pengembangan desa wisata.
- v. Pembangunan sarana pendukung pembinaan kemasyarakatan termasuk bidang keamanan dan ketertiban desa.
- w. Penghasilan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan desa,
- x. Pembangunan infrastruktur lain yang diprioritaskan desa.
- y. Pengembangan seni budaya di desa.

Program DMIJ pada bidang pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.

- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok usaha ekonomi produktif
 2. Kelompok perempuan.
 3. Kelompok tani
 4. Kelompok masyarakat miskin.
 5. Kelompok nelayan.
 6. Kelompok pengrajin.
 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 8. Kelompok pemuda.
 9. Kelompok lain sesuai kondisi desa.
- h. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, aparat desa dan kelembagaan desa.
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peningkatan kapasitas masyarakat bidang keagamaan seperti magrib mengaji

2.5. Keterkaitan Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Partisipasi masyarakat pedesaan sangat diperlukan untuk keberhasilannya pembangunan dan sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat pedesaan. Dalam perencanaan wilayah dan kota banyak pembelajaran bagaimana dalam meningkatkan pembangunan wilayah perkotaan sampai perencanaan pembangunan pada pedesaan.

Setiap Program pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Langkah ataupun kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakkan dalam satu kesatuan dengan daerah kota dalam rangka pengembangan wilayah yang terpadu. Perencanaan wilayah dan kota mempelajari berbagai kebijakan dalam mengatur perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempelajari strategi-strategi dalam pembangunan berkelanjutan agar terlaksananya sebuah program pembangunan yang terpadu baik untuk wilayah perkotaan sampai pedesaan.

Perencanaan wilayah dan kota mempelajari tahapan-tahapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa-desa dengan melihat keadaan desa serta sumber daya alam yang ada di desa-desa untuk dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa. Ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk gotong royong. Tugas utama seorang perencanaan wilayah dan kota adalah dengan menjadikan desa-desa seluruh Indonesia

memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa-desa maju dan berkembang. Dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

2.6. Sintesa Teori

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat ringkasannya yang mendasari sebagai variabel penelitian, berikut tabel sintesa teori:

Tabel 2.2. Sintesa Teori

No	Pendapat	Teori	Variabel
1	Sherry Arnstein (1969)	Bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Manipulation (manipulasi) - Theraphy (terapi/penyembuhan) - Informing (informasi) - Consultation (konsultasi) - Placation (penentraman/perujukan) - Partnership (kerjasama) - Delegated Power (pelimpahan kekuasaan) - Citizen Control (kontrol masyarakat) 	8 tangga tingkat partisipasi : <ul style="list-style-type: none"> - Manipulation - Theraphy - Informing - Consultation - Placation - Partnership - Delegated Power - Citizen Control
2	Goethert (1998)	Tingkatan partisipasi dibagi 5, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - None - Information or Indirect - Consultation - Shared Control - Full Control 	<ul style="list-style-type: none"> - None - Information or Indirect - Consultation - Shared Control - Full Control
3	Chapin (1993)	Skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian terhadap kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan dalam organisasi - Kehadiran di dalam pertemuan - Sumbangan-sumbangan - Keanggotaan di dalam kepengurusan - Kedudukan anggota di dalam kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan dalam organisasi - Kehadiran di dalam pertemuan - Sumbangan-sumbangan - Keanggotaan di dalam kepengurusan - Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.
4	Goldhamer	Untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel yaitu:	-Jumlah asosiasi yang dimasuki

	(1993)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah asosiasi yang dimasuki - Frekuensi kehadiran - Jumlah asosiasi dimana memegang Jabatan - Lamanya menjadi anggota - Tipe asosiasi yang dimasuki 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi kehadiran - Jumlah asosiasi dimana memegang jabatan - Lamanya menjadi anggota - Tipe asosiasi yang dimasuki.
--	--------	---	---

Sumber : Hasil Analisis, 2019



2.7. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai masukan dalam penelitian ini. Untuk itu ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.3. Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Analisis yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Ayu Amalia	2015	Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015	Untuk mengidentifikasi pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015	Analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Secara umum pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Tahun 2015 belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah dalam melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya yang menjadi hambatan sehingga belum bisa ditangani oleh pelaku program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di desa Limau Manis yaitu seperti minimnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pengetahuan sumberdaya manusia yang masih rendah dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) khususnya di tahun 2015.

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Analisis yang digunakan	Hasil Penelitian
2	Syariffudin, SH, MH	2015	Peranan Program Desa Maju Inhil Jaya Dalam Bidang Prasarana Infrastruktur Guna Percepatan Pembangunan di Desa Gemilang Jaya.	Mengidentifikasi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi desa dan antar desa, jalan pendukung pertanian, jalan produksi.	Analisis Deskriptif Kualitatif	Program DMIJ yang sudah terealisasi adalah berupa pembuatan jembatan, semenisasi jalan sepanjang 3 km serta untuk membangun infrastruktur desa di Gemilang Jaya. Dana DMIJ juga dipergunakan untuk merenovasi kantor Desa Gemilang Jaya, selain merenovasi kantor desa, dana DMIJ diperuntukkan untuk merenovasi Posyandu.. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program DMIJ di Desa Gemilang Jaya adalah sebagai berikut: a) Kurangnya Perencanaan; b) Kurangnya Pengetahuan Pendamping Desa, dan c) Kondisi Alam yang Kurang Mendukung.

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Analisis yang digunakan	Hasil Penelitian
3	Kurnia Ibnu Azhari	2011	Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program <i>Neighbourhood Development</i>	Untuk mengetahui bagaimana proses partisipatif di desa Jendi berlangsung serta tingkat partisipasi masyarakat Desa Jendi dalam tahap perencanaan	Analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program <i>Neighbourhood Development</i> adalah dengan nilai total (57,93) dengan score tertinggi adalah pada tataran pengambilan keputusan sebesar (22,78). Sehingga berdasarkan skala partisipasi masyarakat dalam gambar 5.6, dengan total nilai score sebesar 57,93 maka dapat diklasifikasikan kedalam kategori tingkat partisipasi sedang. Partisipasi masyarakat di Desa Jendi termasuk dalam kategori tokenism menurut Arnstein. Penghargaan masyarakat Desa Jendi cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perencanaan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Sagala (2010) pendekatan deduktif adalah penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan yang bermula dengan menyajikan aturan. Pendekatan deduktif merupakan tipe penelitian yang mempunyai tujuan mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana data kuantitatif tersebut diperoleh melalui kuisioner (data primer). Dengan menggunakan *mixed method* adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010 dalam Yendri 2015). *Mixed method* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian.

Penelitian dalam hal ini mencari jawaban dari tujuan penelitian yang diajukan bertitik tolak dari teori-teori yang telah ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh.

3.2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua, data primer dan data sekunder yang memiliki perbedaan dalam memperolehnya namun sama-sama berguna untuk mendukung penelitian.

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat dan tujuan studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarakan melalui internet (Uma Sekaran, 2011) . Cara memperoleh data primer dapat menggunakan cara observasi lapangan, dan kuisioner. Sampel yang diambil dilapangan dengan memilih sampel yang mengetahui. Data-data yang ingin diperoleh dari observasi lapangan antara lain kondisi pelaksanaan pembangunan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008). Data sekunder ini diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian dan dari instansi pemerintahan seperti Laporan Fasilitator Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Kabupaten Indragiri Hilir, dan Fasilitator Desa Maju Inhil Jaya Kecamatan Reteh.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Warsito (1992) dalam Yendri (2015) Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Reteh yakni desa Sanglar, Pulau Kecil, Sungai Undan, Sungai Terab, Sebrang Sanglar, Mekar Sari, Sebrang Pulau Kijang, Sungai Asam, Pulau Ruku, Sungai Mahang dan Tanjung Labuh. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Reteh dalam Angka 2017 untuk jumlah desa di Kecamatan Reteh ada 11 (Sebelas) dengan total jumlah penduduk adalah 26.289 jiwa atau 6.444 Kepala Keluarga (KK).

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode *Simple Random Sampling*, kemudian *Proporsional Sampling* untuk setiap desa dengan menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

- n = Ukuran sampel
 N = Ukuran populasi
 e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari penelitian dari populasi 6.444 Kepala Keluarga (KK) dengan mengambil persen kelonggaran 10%, sebagai berikut :

$$n = \frac{6.444}{1 + 6.444 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.444}{1 + 6.444 (0,01)}$$

$$n = \frac{6.444}{65,44}$$

$$n = 98 \text{ KK}$$

Dari Perhitungan berdasarkan rumus diatas , sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah 98 KK. Penelitian ini memiliki 11 (sebelas) desa daerah penelitian di Kecamatan Reth yang akan diteliti. Adapun

jumlah sampel berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) disetiap desa yang ada di kawasan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Sampel Penelitian Berdasarkan Desa di Kecamatan Reteh

No	Desa	Kepala Keluarga (Orang)	Sampel (Orang)
1	Sanglar	1,517	23
2	Pulau Kecil	1,269	19
3	Sungai Undan	338	5
4	Sungai Terab	278	4
5	Seberang Sanglar	1,030	16
6	Mekar Sari	263	4
7	Seberang Pulau Kijang	296	5
8	Sungai Asam	414	6
9	Pulau Ruku	462	7
10	Tanjung Labuh	339	5
11	Sungai Mahang	238	4
Jumlah		6,444	98

Sumber : Hasil Analisis, 2018

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dari penelitian dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan lapangan sesuai dengan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan DMIJ yang telah berlangsung di desa Kecamatan Reteh dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ tersebut.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008). Daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Reteh.

3.5. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi berbagai tahap-tahap yang dapat mendukung dan mempermudah penelitian sehingga tahap-tahap yang dilakukan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Adapun tahapan penelitian adalah sebagai berikut :

3.5.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam memulai sebuah penelitian. Dalam hal ini langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap persiapan dalam tugas akhir ini adalah :

- a. Menentukan lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Wilayah penelitian ditentukan dengan melihat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh, yang mana faktor tersebut adalah kondisi geografis dan peran serta masyarakat

dalam melakukan pembangunan untuk desanya masih belum banyak yang berpartisipasi untuk mewujudkan desa maju.

- b. Mengurus perizinan untuk keperluan penelitian dalam survei desa di Kecamatan Reteh berupa perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau, dan diteruskan ke Kesbangpol linmas Kabupaten Indragiri Hilir untuk kemudian surat di perbanyak dan disebar ke instansi dan pemerintahan desa di Kecamatan Reteh.
- c. Menentukan kebutuhan data sekunder dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti data monografi desa dan data kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Reteh.
- d. Menentukan data primer yakni melihat kebutuhan apa saja yang dilakukan dalam kuisioner dan wawancara.
- e. Observasi yakni dilakukan *cross check* antara data sekunder dan observasi lapangan.

3.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian di maksudkan penulis terlebih dahulu membuat metode jadwal pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka dilakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu 27 Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

3.5.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian adalah penulis setelah melakukan kegiatan pengecekan terhadap obyek penelitian, maka mulailah diadakan penelitian secara cermat dan menyeluruh.

3.5.4. Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan dan alat yang peneliti gunakan pada penelitian ini pada proses pengambilan data antara lain :

- a. Kamera, berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan data hasil pengamatan selama penelitian.
- b. Alat tulis (pena dan pensil), digunakan untuk mencatat dan menulis data hasil penelitian.
- c. Petunjuk waktu, digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data.
- d. Komputer, untuk mengolah data hasil penelitian.

3.5.5. Tahap Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu teknik penelitian yang bersumberkan dari data yang didapat selama penelitian yang disusun secara sistematis. Data-data kuantitatif diolah berdasarkan hasil dari kuisisioner masyarakat Reteh dengan 98 sampel untuk menuntukan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh.

b. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode ini digunakan untuk menentukan kegiatan DMIJ yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dan laporan Fasilitator Kecamatan. Metode deskriptif kualitatif juga menginterpretasikan hasil kuisisioner yang disebar. Untuk mengelompokkan hasil kuisisioner tersebut menggunakan spss dengan cara analisis distribusi frekuensi dan diolah secara deskriptif.

c. Metode Analisis Tingkat Partisipasi

Pengukuran pada tingkat partisipasi di sesuaikan dengan teori Arnstein. Berdasarkan teori Arnstein dapat ditabelkan kategori tingkatan partisipasi sebagai berikut

Tabel 3.2. Kategori Tingkatan Partisipasi

No	Tingkatan	Klasifikasi Arnstein
1	Rendah (<i>Nonparticipation</i>)	Manipulasi Terapi
2	Sedang (<i>Tokenism</i>)	Informasi Konsultasi Penentraman
3	Tinggi (<i>Citizen Power</i>)	Kerja sama Pelimpahan Kekuasaan Kontrol Masyarakat.

Sumber : (Muta'ali, 2013)

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Analisis yang dilakukan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui tingkat partisipasi itu sendiri dilakukan penjumlahan skor dari tiap variabel partisipasi dalam perencanaan. Diketuainya tingkat partisipasi berdasarkan tipologi delapan tangga Sherry Arnstein. Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :

Terdapat 4 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 8 pilihan dengan tiap skor terdiri dari 1 sampai 8. Sehingga dapat ditentukan minimum skor yang diperoleh tiap individu (4×1) adalah 4, sedangkan untuk maksimum skor tiap individu (4×8) adalah 32, dengan jumlah sampel 98 dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah ($98 \times 4 \times 1$) adalah 392 dan skor maksimal ($98 \times 4 \times 8$) adalah 3136.

Dengan diketahuinya minimum skor dan maksimum skor dapat diketahuinya interval yaitu $(3136 - 392) / 8 = 343$. Maka tipologi dari Arnstein dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah :

Tabel 3.3. Skoring Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan

No	Tingkat Partisipasi	Skoring
1	<i>Citizen Power</i> (Kontrol Masyarakat)	2793-3136
2	<i>Delegated Power</i> (Pelimpahan Kekuasaan)	2450-2792
3	<i>Partnership</i> (Kerjasama)	2107-2449
4	<i>Placation</i> (Penentraman/Perujukan)	1764-2106
5	<i>Consultation</i> (Konsultasi)	1421-1763
6	<i>Informing</i> (Informasi)	1078-1420
7	<i>Theraphy</i> (Terapi/Penyembuhan)	735 – 1077
8	<i>Manipulation</i> (Manipulasi)	392 – 734

Sumber : Hasil Analisis, 2019

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Analisis yang digunakan pada partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan yaitu menggunakan pembagian dari tingkatan tipologi Arnstein yaitu tingkatan partisipasi rendah (*Nonparticipation*), partisipasi sedang (*Tokenism*), dan partisipasi tinggi (*Citizen Power*).

Untuk mengetahui tingkatan partisipasi tersebut menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Tingkatan partisipasi dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel partisipasi dalam pelaksanaan.

Terdapat 3 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 3 pilihan dengan jumlah skor berkisar 1 sampai 3. Sehingga dapat ditentukan skor minimum dari setiap individu adalah (3 x 1) adalah 3, dan skor maksimum dari setiap individu adalah (3 x 3) adalah 9 dengan jumlah sampel 98. Dengan demikian dapat diketahuinya minimum skor partisipasi

dalam pelaksanaan adalah $(98 \times 3 \times 1)$ adalah 294 dan maksimal skor $(98 \times 3 \times 3)$ adalah 882.

Dengan diketahuinya skor maksimal dan skor minimum dapat diketahui interval untuk menentukan tingkatan partisipasi yaitu $(882 - 294) / 3 = 196$.

Dengan tingkatan partisipasi dalam pelaksanaan dapat diketahui yaitu :

Tabel 3.4. Skoring Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan

No	Tingkatan	Skoring
1	Rendah (<i>Nonparticipation</i>)	294-489
2	Sedang (<i>Tokenism</i>)	490-686
3	Tinggi (<i>Citizen Power</i>)	687-882

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.6. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan skema pencapaian tujuan penelitian yang dimuat dalam bentuk tabel agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun desain penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Desain Penelitian

No	Sasaran Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Analisis
1	Teridentifikasinya program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Program DMIJ	Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh.	Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya	Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh.	Analisis Deskriptif Kualitatif
2	Diketuainya tingkat partisipasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Partisipasi dalam Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Kehadiran dalam Musyawarah atau rapat Desa 2. Partisipasi dalam Mengemukakan Masukan/saran/usul. 3. Partisipasi dalam menetapkan konsep rencana. 4. Partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana (Suciati,2006) 	Tingkat Partisipasi Menurut Sherry Arnstein (1969)	Responden (Masyarakat di desa Kecamatan Reteh dengan jumlah sampel 98).	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif.
		Partisipasi dalam Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam bentuk uang atau benda. 2. Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide. 3. Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong). 			

Sumber : Hasil Analisis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomi, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara $0^{\circ} 36'$ Lintang Utara dan $1^{\circ} 07'$ Lintang Selatan, dan antara $104^{\circ} 10'$ - $102^{\circ} 32'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas wilayah antara lain :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan ;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu ;
4. Sebelah Timur dengan Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, yaitu: Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Reteh, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanahmerah, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas, Kecamatan Gauang Anak Serka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Tempuling.

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana

perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

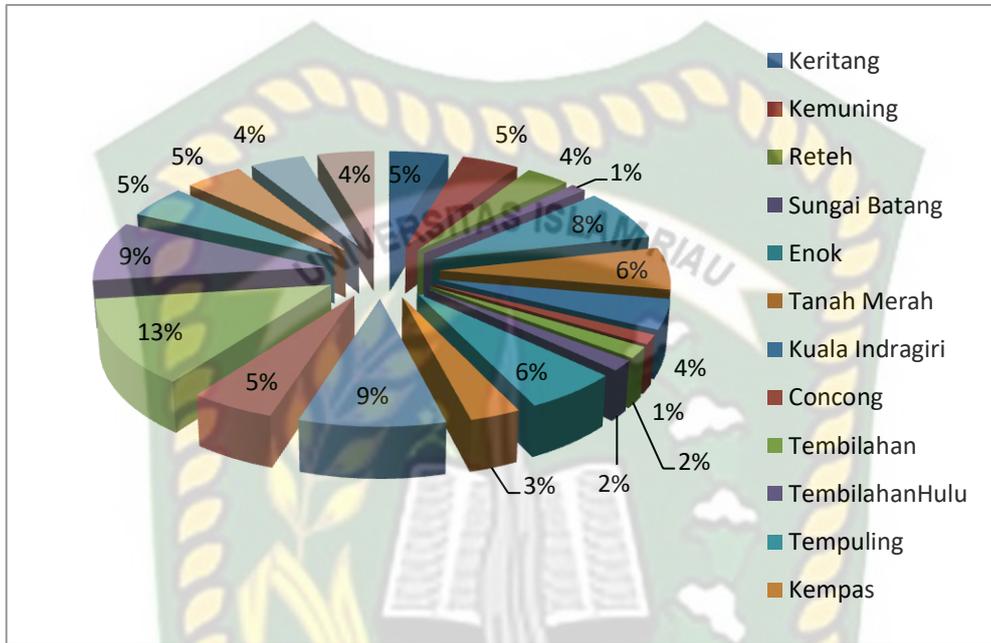
Tabel 4.1. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Pulau Burung	520,00	4.48
2	Kateman	561,09	4.83
3	Mandah	1.479,24	12.75
4	Gaung Anak Serka	612,75	5.28
5	Concong	160,29	1.38
6	Kuala Indragiri	511,63	4.41
7	Tanah Merah	721,56	6.22
8	Sungai Batang	145,99	1.26
9	Reteh	407,75	3.51
10	Keritang	543,45	4,68
11	Kemuning	525,48	4.53
12	Enok	880,86	7.59
13	Tembilahan	197,37	1.70
14	Tembilahan Hulu	180,62	1.56
15	Tempuling	691,19	5.96
16	Kempas	364,49	3.14
17	Batang Tuaka	1.050,25	9.05
18	Gaung	1.021,74	8.80
19	Pelangiran	531,22	4.58
20	Teluk Belengkong	499,00	3.30
Jumlah		11.605, 97	100.00

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan persentase wilayah terluas adalah Kecamatan Mandah dengan persentase 12.75% dari total luas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan kecamatan dengan persentase

terendah adalah Kecamatan Sungai Batang dengan persentase luas 1.26%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui diagram berikut :



Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

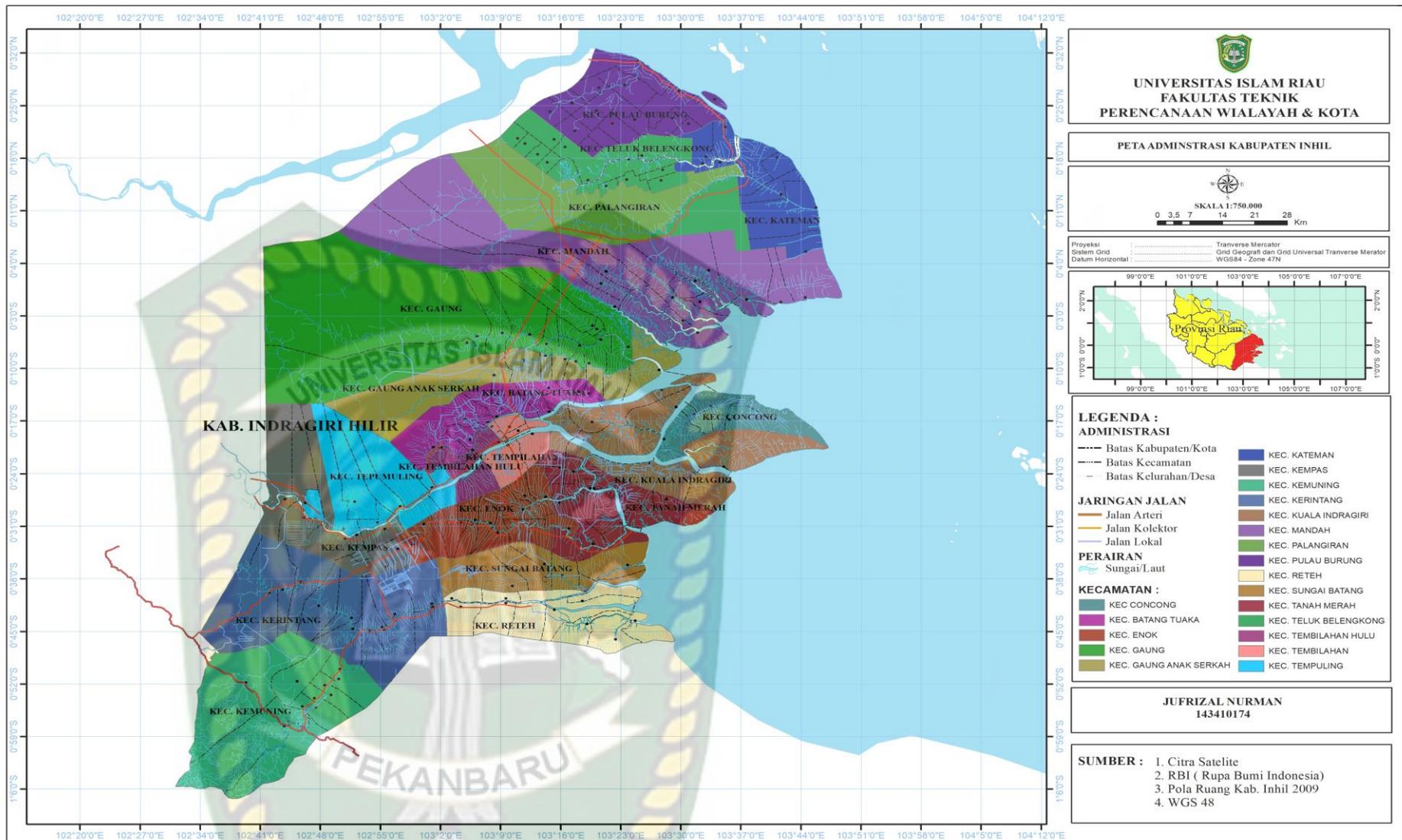
Gambar 4.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kondisi Kabupaten Indragiri Hilir yang dipisahkan oleh parit dan sungai menjadikan wilayahnya sangat bergantung pada alat transportasi air untuk menjangkau satu wilayah ke wilayah lainnya seperti *speed boat*, pompong, perahu sampan dan lain-lain. Jarak antara ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir terhadap wilayah kecamatannya juga tergolong jauh, khususnya untuk wilayah-wilayah pesisir yang secara geografis hanya bisa dijangkau melalui transportasi air. Berikut ini tabel jarak ibu kota Kecamatan terhadap ibu kota Kabupaten Indargiri Hilir adalah :

Tabel 4.2. Jarak Ibu Kota Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

Kecamatan	Jarak (km)	Ibu kota Kecamatan
Keritang	53,8	Kotabaru Reteh
Kemuning	85	Selensen
Reteh	41,7	Pulau Kijang
Sungai Batang	37,4	Benteng
Enok	21,4	Enok
Tanah Merah	34	Kuala Enok
Kuala Indragiri	17,5	Sapat
Concong	54,3	Concong Luar
Tembilahan	0,9	Tembilahan Hilir
Tembilahan Hulu	2,6	Tembilahan Hulu
Tempuling	29,7	Sungai Salak
Kempas	45,3	Harapan Tani
Batang Tuaka	15,4	Sungai Piring
Gaung Anak Serka	26,8	Teluk Pinang
Gaung	34	Kuala Lahang
Mandah	49,6	Khairiah Mandah
Kateman	83,9	Tagaraja
Pelangiran	60	Pelangiran
Teluk Belengkong	90	Saka Rotan
Pulau Burung	92	Pulau Burung

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018



Gambar 4.2. Peta Adminstrasi Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.2. Topografi Wilayah

Topografi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah berada pada dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, rawa dengan tanah gambut (*Peat*), dan daerah hutan payau (*Mangrove*), wilayahnya juga terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar. Wilayah pada Kabupaten Indragiri Hilir memiliki rata-rata ketinggian 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut.

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kemiringan 0 – 2 %, seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Berikut ini dapat dilihat tabel ketinggian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dari permukaan laut menurut kecamatan :

Tabel 4.3. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1	Keritang	6 s/d 35
2	Kemuning	6 s/d 35
3	Reteh	1 s/d 4
4	Sungai Batang	1 s/d 4
5	Enok	1 s/d 5,5
6	Tanah Merah	1 s/d 4
7	Kuala Indragiri	1 s/d 4
8	Concong	1 s/d 4
9	Tembilahan	1 s/d 4
10	Tembilahan Hulu	1 s/d 4
11	Tempuling	1 s/d 4
12	Kempas	1 s/d 4
13	Batang Tuaka	1 s/d 4
14	Gaung Anak Serka	1 s/d 4
15	Gaung	1 s/d 4
16	Mandah	1 s/d 4
17	Kateman	1 s/d 4
18	Pelangiran	1 s/d 4
19	Teluk Belengkong	1 s/d 10
20	Pulau Burung	1 s/d 4

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

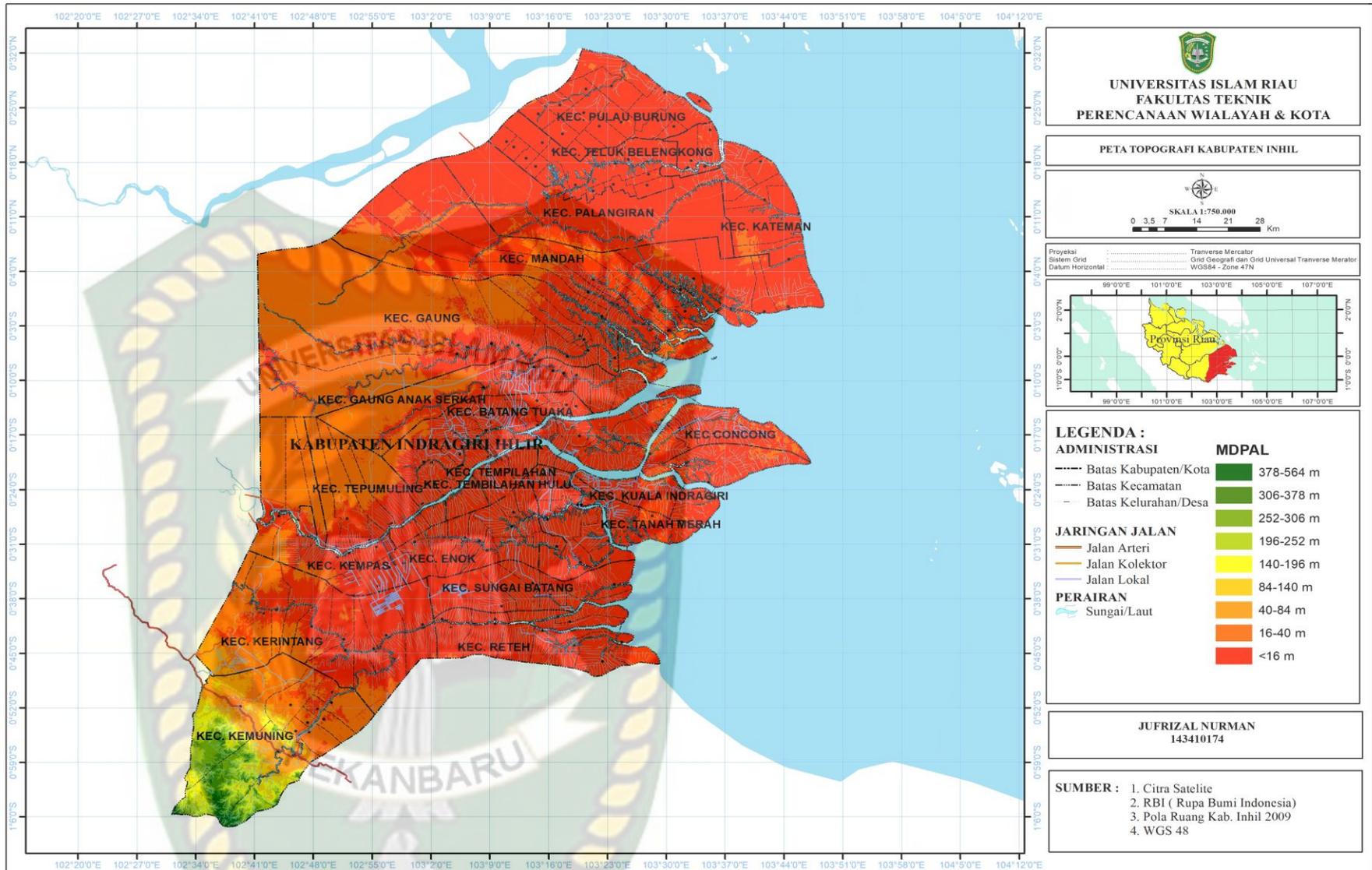
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir berada pada ketinggian antara 1-35 meter dari permukaan laut. Apabila dilihat dari ketinggian tersebut wilayah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di klasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

1. Daratan yang berada pada ketinggian terendah antara 1-4 Meter dari permukaan laut seperti daerah : Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, dan Pulau Burung.

2. Daratan yang berada pada ketinggian antara 6-35 meter seperti daerah: Keritang dan Kemuning.

Berikut adalah peta topografi Kabupaten Indragiri Hilir :





Gambar 4.3 Peta Topografi Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.3. Geologi

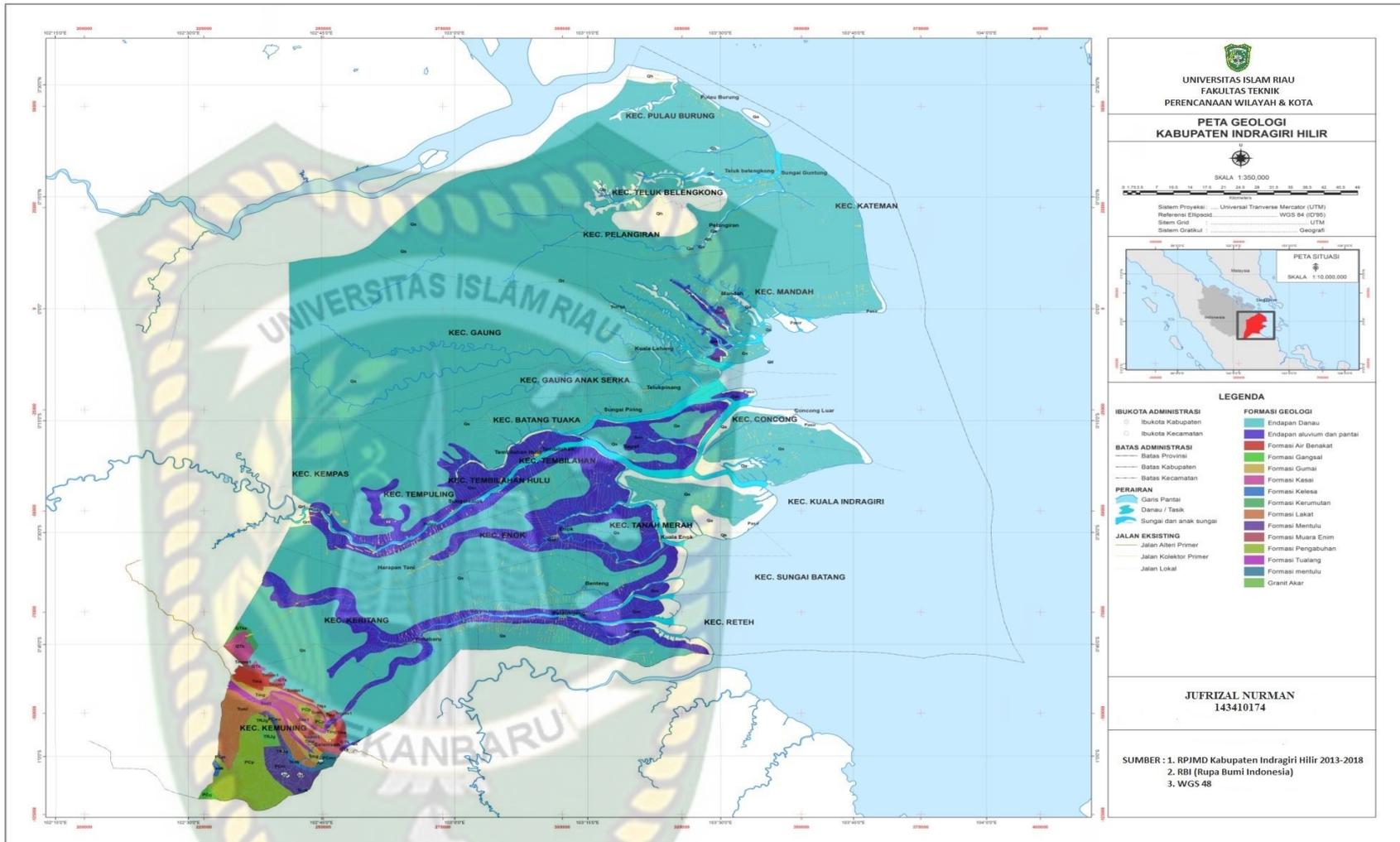
Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus (Indragiri Hilir dalam angka, 2018).

Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai dan endapan rawa yang keduanya mempunyai umur Kuartar. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu-abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

1. Lempung abu-abu, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/sticky, dan kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm². Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm² dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryono, 1986).
2. Pasir, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
3. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
4. Gambut, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90 %) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Berikut adalah peta geologi Kabupaten Indragiri Hilir :



Gambar 4.4. Peta Geologi Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.4. Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Untuk sumberdaya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumberdaya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu.

4.1.5. Klimatologi

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut.

Pada tahun 2010, rata-rata curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 158,16 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 11 hari. Rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu 223,2 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 12 hari. Rata-rata curah hujan dan curah hujan menurut bulan di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	10	137,7
Februari	11	169,0
Maret	14	226,4
April	12	183,1
Mei	10	120,8
Juni	8	98,7
Juli	6	86,8
Agustus	9	142,1
September	11	183,7
Oktober	10	184,8
November	13	240,6
Desember	13	191,9
Rata-rata	10	136,15

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

4.1.6. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Untuk daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang dan Kemuning terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah gleihumus dan organosol termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Di daerah Reth lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah

ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

4.1.7. Penggunaan Lahan

Pada saat berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir tahun 1965, sebagian besar penggunaan lahan merupakan daerah rawa, gambut dan hutan payau. Akan tetapi, dalam jangka waktu kurang lebih 40 tahun sudah terjadi perubahan yang cukup pesat. Pada tahun 2017, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh perkebunan seluas 753.450 Ha atau sekitar 55,09 % dari luas total wilayah secara administrasi, yaitu 1.367.551 Ha. Sedangkan untuk tambak atau kolam hanya memiliki luas 6.674 ha atau 0,47 % dari luas wilayah kabupaten.

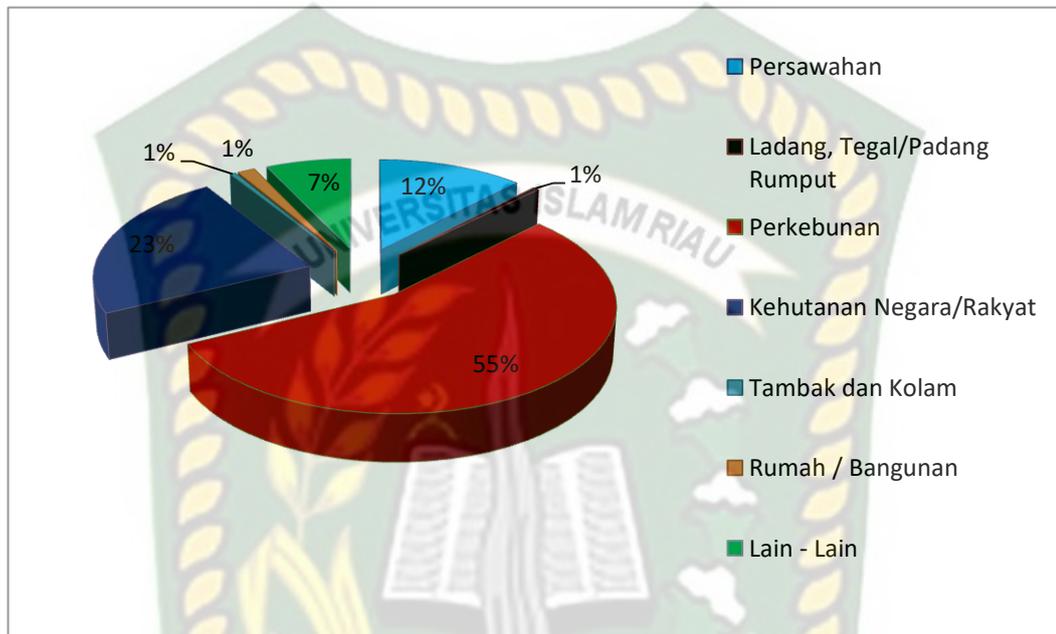
Kegiatan budidaya lainnya yang cukup berkembang adalah kehutanan negara/rakyat seluas 318.122 Ha, Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	165.575	12,11
2	Ladang, Tegal/Padang Rumput	6.674	0,49
3	Perkebunan	753.450	55,09
4	Kehutanan Negara/Rakyat	318.122	23,26
5	Tambak dan Kolam	6.470	0,47
6	Rumah / Bangunan	19.813	1,45
7	Lain – Lain	97.448	7,13
Jumlah		1.367.551	100,00

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas di dominasi oleh lahan perkebunan dengan



luas 753.450 hektar, atau 55,09% dari total luas Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat melalui grafik berikut :

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

Gambar 4.5. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

4.1.8. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 adalah sebanyak 722.234 jiwa yang terdiri atas 370.603 jiwa penduduk laki-laki dan 351.631 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,40. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan

Tembilahan yaitu 76.122 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.763 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Keritang	33.952	32.871	66.823
2	Kemuning	17.373	16.270	33.643
3	Reteh	22.785	22.816	45.601
4	Sungai Batang	6.439	6.324	12.763
5	Enok	18.243	17.421	35.664
6	Tanah Merah	16.396	15.751	32.147
7	Kuala Indragiri	10.342	9.884	20.226
8	Concong	7.145	6.843	13.988
9	Tembilahan	38.403	37.719	76.122
10	Tembilahan Hulu	23.582	23.339	46.921
11	Tempuling	16.497	15.690	32.187
12	Kempas	18.497	17.226	35.723
13	Batang Tuaka	14.836	13.951	28.787
14	Gaung Anak Serka	11.576	11.401	22.977
15	Gaung	21.611	20.275	41.886
16	Mandah	20.879	20.248	41.127
17	Kateman	25.041	23.010	48.051
18	Pelangiran	25.576	21.201	46.777
19	Teluk Belengkong	9.231	8.504	17.735
20	Pulau Burung	12.237	10.847	23.084
Jumlah		370.603	351.631	722.234

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

4.1.9. Aspek Sosial

Aspek sosial di Kabupaten Indragiri Hilir bermanfaat untuk dapat melihat seberapa banyak fasilitas yang tersebar di seluruh kecamatan pada Kabupaten

Indragiri Hilir. Aspek sosial di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi pendidikan, Kesehatan dan keagamaan.

4.1.9.1. Pendidikan

Pada Tahun ajaran 2017, jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain: 517 Sekolah Dasar (SD), 186 Madrasah Ibtida'iyah (MI), 136 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 141 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 45 Sekolah Menengah Atas (SMA), 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 55 Madrasah Aliyah (MA). Setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fasilitas sekolah di setiap jenjang.

Tabel 4.7. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	703
2	SMP/MTS	277
3	SMA/MA/SMK	119

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

4.1.9.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pada tahun 2017 ada 3 Rumah Sakit, 27 Puskesmas dan 170 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 4.8. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poskesdes
1	Keritang	0	2	12	57	3
2	Kemuning	0	1	9	26	1
3	Reteh	1	1	9	38	0
4	Sungai Batang	0	1	3	11	0
5	Enok	0	2	12	35	0
6	Tanah Merah	0	2	6	30	4
7	Kuala Indragiri	0	1	7	30	0
8	Concong	0	1	4	17	1
9	Tembilahan	1	2	6	50	3
10	Tembilahan Hulu	0	1	5	29	2
11	Tempuling	0	1	8	27	0
12	Kempas	0	1	10	32	1
13	Batang Tuaka	0	1	10	30	0
14	Gaung Anak Serka	0	2	7	28	0
15	Gaung	0	1	13	36	1
16	Mandah	0	3	14	41	8
17	Kateman	1	1	7	27	0
18	Pelangiran	0	1	12	21	3
19	Teluk Belengkong	0	1	5	12	7
20	Pulau Burung	0	1	11	24	0
	Jumlah	3	27	170	601	34

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

4.1.9.3. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk Agama Islam. Hal ini dapat digambarkan dari banyaknya jumlah Masjid dan Surau/mushalla sebagai tempat ibadah umat islam. Tempat ibadah sangat penting selain digunakan sebagai tempat ibadah, biasanya juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan, dan lain sebagainya.

Tabel 4.9. Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja	Kelenteng	Vihara
1	Keritang	109	40	0	0	0
2	Kemuning	33	13	0	0	0
3	Reteh	62	87	0	0	0
4	Sungai Batang	24	34	0	0	0
5	Enok	55	50	0	0	0
6	Tanah Merah	13	1	0	0	1
7	Kuala Indragiri	50	19	0	0	1
8	Concong	14	21	0	0	0
9	Tembilahan	46	58	1	0	1
10	Tembilahan Hulu	12	20	0	1	0
11	Tempuling	44	27	0	0	0
12	Kempas	60	13	0	0	0
13	Batang Tuaka	40	13	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	26	41	0	1	0
15	Gaung	49	37	0	0	1
16	Mandah	79	18	0	0	1
17	Kateman	60	24	0	1	1
18	Pelangiran	20	16	0	0	0
19	Teluk Belengkong	26	31	0	0	0
20	Pulau Burung	24	13	0	0	0
	Jumlah	846	576	1	3	6

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 terdapat sarana keagamaan yang terdiri dari 846 mesjid, 756 surau dan mushalla yang merupakan tempat beribadah bagi umat Islam. Selain itu ada juga tempat ibadah bagi umat lainnya yaitu Kristen dan Budha.

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Reteh

4.2.1. Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Reteh

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 724.75 Km² atau 72.475 Ha. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu Kelurahan Pulau Kijang dengan jarak ke Kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 Km. Kecamatan Reteh terletak pada hamparan di bagian utara Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Batang,
2. Sebelah selatan dengan Kabupaten dengan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi,
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang, dan
4. Sebelah timur dengan Selat Berhala.

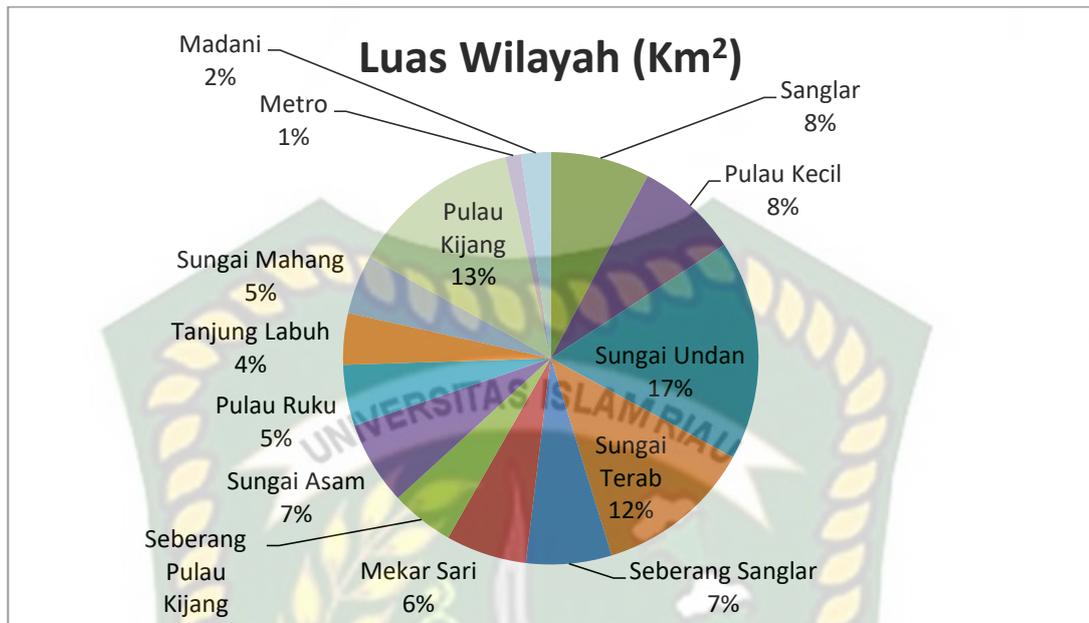
Adapun transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Reteh ke Ibukota Kabupaten yaitu dengan *speed boat* atau lebih dikenal dengan bahasa setempat pompong. Jalur darat juga bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua dengan kondisi jalan yang belum merata pembangunannya hingga saat ini sulit untuk dilalui terlebih lagi saat musim hujan. Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur *trayek* tetap untuk transportasi laut, sehingga harus menyewa *boot/pompong*, jika akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu Desa Sungai Terab, Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan Desa

Tanjung Labuh. Desa-desa tersebut lebih dekat ke Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Tabel 4.10. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh 2016

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
Desa			
1	Sanglar	56,00	7,73
2	Pulau Kecil	58,00	8,00
3	Sungai Undan	125,00	17,25
4	Sungai Terab	89,05	12,29
5	Seberang Sanglar	48,21	6,65
6	Mekar Sari	45,73	6,31
7	Seberang Pulau Kijang	35,75	4,93
8	Sungai Asam	47,52	6,56
9	Pulau Ruku	34,60	4,77
10	Tanjung Labuh	29,30	4,04
11	Sungai Mahang	33,45	4,62
Kelurahan			
12	Pulau Kijang	96,67	13,34
13	Metro	8,75	1,21
14	Madani	16,72	2,31
Jumlah		724,75	100,00

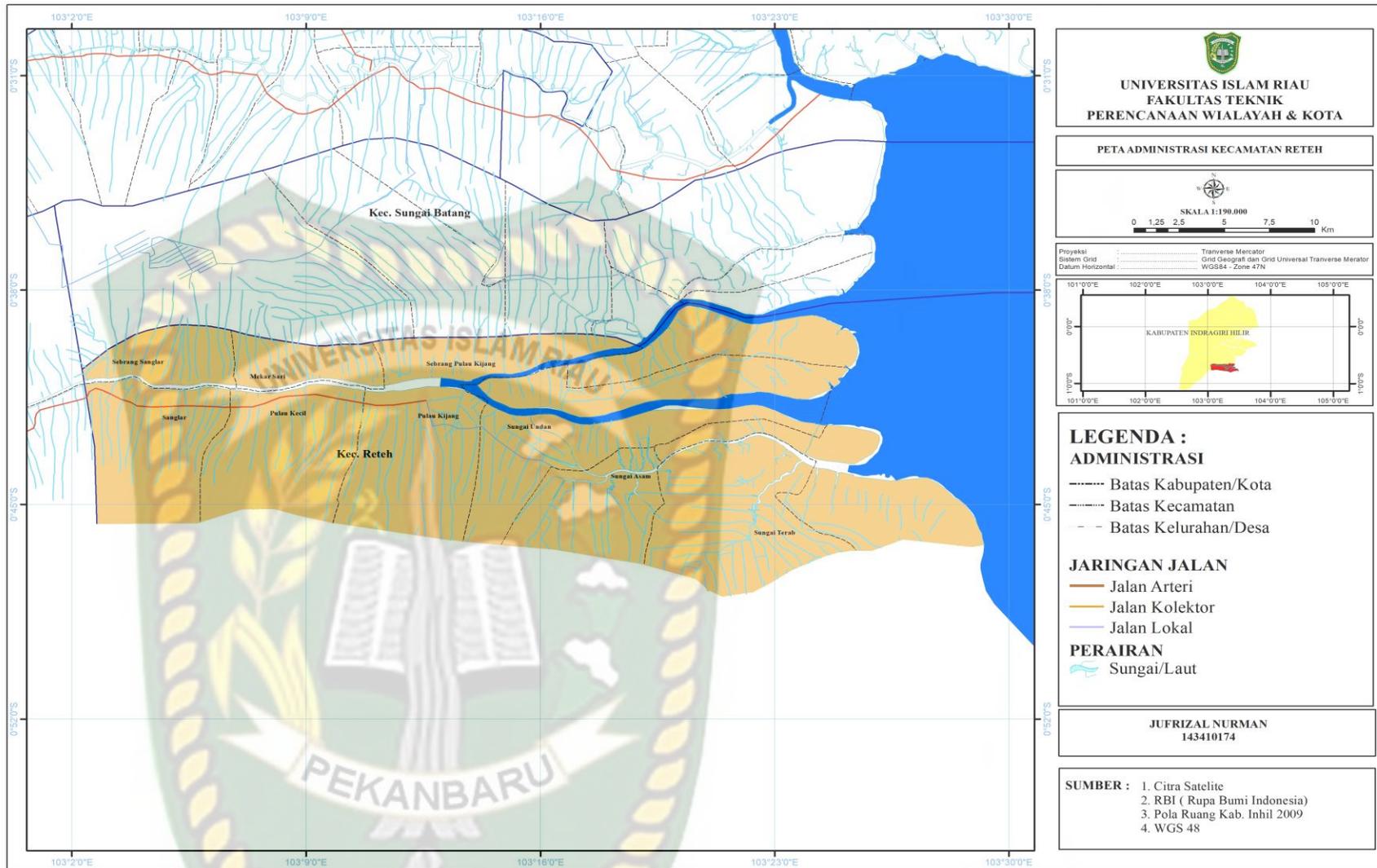
Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017



Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

Gambar 4.6. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh (Km²), 2016

Pada Kecamatan Reteh memiliki luas wilayah keseluruhan 724.75 Km² atau 72.475 Ha. Dari 11 (sebelas) desa dan 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kecamatan Reteh Desa/Kelurahan yang paling luas wilayahnya berada pada Desa Sungai Undan. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan yang paling kecil wilayahnya terdapat di Kelurahan Metro. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat peta administrasi Kecamatan Reteh berikut :



Gambar 4.7. Peta Adminstrasi Kecamatan Reteh

4.2.2. Keadaan Alamnya

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa, palawija dan hortikultura. Hutan bakau, dan nipah yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat berkembangnya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

Ada beberapa sungai yang mengalir di Kecamatan Reteh yang digunakan sebagai jalur transportasi air, yaitu Sungai Gangsal, Sungai Hujan, dan Sungai Undan yang semuanya bermuara di Selat Berhala. Selain aliran sungai, jalur lintas darat juga dapat menghubungkan Kecamatan Reteh dengan Kecamatan lainnya, Ibukota Kabupaten, Provinsi, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Pada prinsipnya, mata pencaharian sebagaimana kondisi wilayah Kecamatan Reteh dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Daerah Pesisir pantai

Masyarakat yang berdomisili di daerah ini (Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Undan, dan desa Sungai Terap) bermata pencaharian sebagai nelayan serta perkebunan kelapa dalam (lokal).

2. Dataran Rendah/Rawa-Rawa

Sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah rawa-rawa ini (pinggir sungai gangsal) adalah bercocok tanam padi-padian dan palawija.

3. Daerah Gambut

Struktur tanah yang terletak diantara tanah rawa-rawa dengan tanah gambut sangat potensi untuk areal kebun kelapa. Sehingga masyarakat yang berdomisili atau yang memiliki lahan dan wilayah ini kehidupannya sangat bergantung pada produksi kebun kelapa.

Pada tiga kondisi lahan tersebut, oleh masyarakat Kecamatan Reteh diolah dengan cara tradisional. Dengan semakin terbukanya instalasi darat, peluang pasar, dan semakin banyaknya konsumen akibat lajunya pertumbuhan penduduk, dikhawatirkan produktifitas petani tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga dengan demikian sangat diperlukan system intensifikasi dan ekstensifikasi yang didukung dengan mesin-mesin produksi efektif.

4.2.3. Kependudukan Kecamatan Reteh

Kecamatan Reteh merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beraneka ragam suku, di mana suku pertama yang mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian di tempati oleh suku-suku lain seperti Bugis, Jawa, Banjar, Minang, Cina, dan Batak. Penduduk bermata pencaharian petani, nelayan, pedagang, dan pegawai pemerintah.

Penduduk Kecamatan Reteh pada tahun 2016 berjumlah 45.109 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 10.676. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Pulau Kijang yaitu 15.037 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Mekar Sari yaitu 992 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Reteh adalah 100 menunjukkan bahwa dalam 100 perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki berjumlah 22.539 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 22.570 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Reteh yaitu 111 orang/Km² yang merupakan masih dalam kondisi ideal (ideal : setiap 1 Km² jumlah penduduk adalah 1000 orang atau 40 orang per hektar). Wilayah yang paling padat penduduk yaitu Kelurahan Metro dengan 231 orang/Km² dan yang paling jarang penduduknya yaitu Desa Sungai Terab dengan 11 orang/Km² (Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017).

Tabel 4.11. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2015 dan 2016

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah Rumah Tangga	
		2015	2016	2015	2016
Desa					
1	Sanglar	5.971	6.034	1.497	1.517
2	Pulau Kecil	4.494	4.999	1.253	1.269
3	Sungai Undan	2.396	2.424	334	338
4	Sungai Terab	1.005	1.015	274	278
5	Seberang Sanglar	3.653	3.692	1.016	1.030
6	Mekar Sari	982	992	260	263
7	Seberang Pulau Kijang	1.133	1.145	293	296
8	Sungai Asam	1.553	1.571	409	414
9	Pulau Ruku	1.880	1.903	456	462
10	Tanjung Labuh	1.165	1.176	335	339
11	Sungai Mahang	1.325	1.338	233	238
Kelurahan					
12	Pulau Kijang	14.848	15.037	3.221	3.263
13	Metro	1.996	2.019	500	507
14	Madani	1.747	1.764	456	462
Jumlah		44.148	45.109	10.537	10.676

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Desa					
1	Sanglar	3.079	2.955	6.034	104
2	Pulau Kecil	2.582	2.471	5.053	102
3	Sungai Undan	1.216	1.208	2.424	101
4	Sungai Terab	520	495	1.015	105
5	Seberang Sanglar	1.906	1.786	3.692	107
6	Mekar Sari	503	489	992	103
7	Seberang Pulau Kijang	601	544	1.145	110
8	Sungai Asam	787	784	1.571	100
9	Pulau Ruku	920	983	1.903	94
10	Tanjung Labuh	610	566	1.176	339
11	Sungai Mahang	740	598	1.338	124
Kelurahan					
12	Pulau Kijang	7.172	7.865	15.037	91
13	Metro	1.016	1.003	2.019	101
14	Madani	941	823	1.764	114
Jumlah		22.593	22.570	45.163	

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

Tabel 4.13. Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Desa				
1	Sanglar	56,00	6.034	108
2	Pulau Kecil	58,00	4.999	86
3	Sungai Undan	125,00	2.424	19
4	Sungai Terab	89,05	1.015	11
5	Seberang Sanglar	48,21	3.692	77
6	Mekar Sari	45,73	992	22
7	Seberang Pulau Kijang	35,75	1.145	32
8	Sungai Asam	47,52	1.571	33
9	Pulau Ruku	34,60	1.903	55
10	Tanjung Labuh	29,30	1.176	40
11	Sungai Mahang	33,45	1.338	40
Kelurahan				
12	Pulau Kijang	96,67	15.037	156
13	Metro	8,75	2.019	231
14	Madani	16,72	1.764	106
Jumlah		724,75	45.109	

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

4.2.4. Sosial

4.2.4.1. Pendidikan

Kecamatan Reteh Memiliki 53 sarana pendidikan yang tersebar di 14 Desa/Kelurahan, terdiri atas 44 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta, pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, setiap desa minimal terdapat 1 sekolah, Kecuali Desa Tanjung Labuh dan Sungai Mahang, Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat beberapa desa tidak memiliki sekolah, yaitu Desa Sungai Undan, Sungai Terab, Sungai Asam, Tanjung Labuh, dan Sungai Mahang serta Kelurahan

Madani. Sementara itu pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat hanya terdapat di Kelurahan Metro dan Pulau Kijang.

Tabel 4.14. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016

No	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	Jumlah
Desa					
1	Sanglar	5	2	-	7
2	Pulau Kecil	5	1	-	6
3	Sungai Undan	1	-	-	1
4	Sungai Terab	3	-	-	3
5	Seberang Sanglar	4	1	-	5
6	Mekar Sari	1	1	-	2
7	Seberang Pulau Kijang	2	1	-	3
8	Sungai Asam	2	-	-	2
9	Pulau Ruku	1	1	-	2
10	Tanjung Labuh	-	-	-	-
11	Sungai Mahang	-	-	-	-
Kelurahan					
12	Pulau Kijang	11	3	2	16
13	Metro	2	1	1	4
14	Madani	1	-	-	1
Jumlah		38	11	3	52

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

4.2.4.2. Kesehatan

Di Kecamatan Reteh saat ini telah memiliki satu unit rumah sakit yang terletak di Kelurahan Madani dan tidak jauh dari Ibukota Kecamatan Reteh yakni Kelurahan Pulau Kijang. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Tengku Sulung.

Sedangkan untuk puskesmas pada Kecamatan Reteh terletak di Kelurahan Pulau Kijang merupakan sarana kesehatan masyarakat Kecamatan Reteh, dimana pada tahun 2016 terdapat 25.117 kunjungan pasien. Dari segi

jumlah dokter dan tenaga kesehatan terdapat sebanyak 57 profesional yang terdiri 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 34 orang bidan, dan 21 orang perawat.

Tabel 4.15. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Poskesdes	Praktek Tenaga Kesehatan
Desa							
1	Sanglar	-	-	1	-	1	3
2	Pulau Kecil	-	-	1	1	1	2
3	Sungai Undan	-	-	1	-	-	4
4	Sungai Terab	-	-	1	-	-	2
5	Seberang Sanglar	-	-	1	-	-	2
6	Mekar Sari	-	-	-	-	-	3
7	Seberang Pulau Kijang	-	-	-	1	-	2
8	Sungai Asam	-	-	1	-	-	3
9	Pulau Ruku	-	-	1	-	-	1
10	Tanjung Labuh	-	-	1	-	-	1
11	Sungai Mahang	-	-	-	-	-	1
Kelurahan							
12	Pulau Kijang	-	1	-	-	-	8
13	Metro	-	-	-	-	-	2
14	Madani	1	-	-	-	-	3
Jumlah		1	1	8	2	2	37

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

4.2.4.3. Keagamaan

Pada Kecamatan Reteh Mayoritas keagamaannya adalah beragama islam dimana terdapat 69 masjid dan 101 musholla yang tersebar di 14 Desa/Kelurahan. Untuk memfasilitasi masyarakat yang mayoritas berpenduduk beragama islam masjid/musholla sudah tersebar merata di setiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Reteh itu sendiri. Sedangkan untuk tempat beribadah untuk agama lain saat ini

belum ada di Kecamatan Reteh. Biasanya umat *non muslim* ini pergi ke tempat peribadahan mereka selalu keluar dari Kecamatan Reteh.

Tabel 4.16. Jumlah Sarana Peribadahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh, 2016

No	Desa/Kelurahan	Masjid (Unit)	Surau/Musholla (Unit)
Desa			
1	Sanglar	12	8
2	Pulau Kecil	10	15
3	Sungai Undan	7	5
4	Sungai Terab	5	1
5	Seberang Sanglar	4	12
6	Mekar Sari	2	4
7	Seberang Pulau Kijang	4	2
8	Sungai Asam	5	5
9	Pulau Ruku	2	2
10	Tanjung Labuh	1	-
11	Sungai Mahang	3	6
Kelurahan			
12	Pulau Kijang	7	31
13	Metro	3	3
14	Madani	4	7
Jumlah		69	101

Sumber : Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Mengidentifikasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh

Program DMIJ yang sudah terlaksana di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terbagi dalam 2 (dua) bidang pembangunan desa, yaitu : bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan masyarakat desa.

Adapun untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa lebih mengarah pada pembangunan fisik. Sedangkan untuk bidang pembinaan masyarakat desa bersifat *non*-fisik.

5.1.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

5.1.1.1. Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan di Kecamatan Reteh merupakan Program DMIJ bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pembangunan jalan ini juga merupakan kegiatan yang paling banyak di usulkan oleh masyarakat desa dikarenakan masih banyak kondisi jalan yang tidak layak di Kecamatan.

Di Kecamatan Reteh masih ada desa yang tidak bisa di lewati melalui jalan darat yaitu Desa Sungai Terab, Desa Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan Desa Tanjung Labuh. untuk itu perlu adanya pembangunan jalan yang dilaksanakan untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Reteh. Pembangunan jalan terbilang sulit untuk Kecamatan Reteh ini karena tanah gambut dan sebagian terdapat rawa-rawa.

Program DMIJ untuk meningkatkan jalan-jalan di Kecamatan Reteh sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sehingga sangat penting pembangunan jalan ini dilaksanakan di Kecamatan Reteh. Pembangunan jalan juga merupakan pembangunan yang paling banyak dilakukan di Kecamatan Reteh.

Adapun lokasi-lokasi yang telah dilakukan pembangunan jalan di Kecamatan Reteh dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.1. Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2015

No	Desa	2015				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
1	Sanglar	Jl. Merdeka	Pembangunan Jalan	200	3	0,12
		Jl. Budi Utomo	Pembangunan Jalan	72	3	0,12
		Jl. Sudirman	Pembangunan Jalan	155	2	0,10
		Jl. Merdeka	Median Jalan	500	0,6	
		Jl. Patimura	Pembangunan Jalan	73	1,1	0,10
		Jl. A. Yani	Pembangunan Jalan	123	1	0,10
		Jl. Merdeka Ujung	Pembangunan Jalan	460	3,5	0,10
2	Sebrang Sanglar	Jl. Tengku Sulung RW. 3	Pembangunan Jalan	230	1	0,12
		Jl. Ali Haji	Pembangunan Jalan	230	2	0,12
		Jl. Dermaga	Pembangunan Jalan	75	2	0,12
		Jl. Tengku Sulung RW. 5	Pembangunan Jalan	600	1	0,12
		Jl. Lingkungan	Pembangunan Jalan	200	1	0,12
		Jl. Tengku Sulung	Pembangunan Jalan	200	1	0,12
3	Pulau Kecil	Dusun Tuah Sakti	Pembangunan Jalan	400	4	0,12
		Parit 9	Pembangunan Jalan	300	1,5	0,12
		Parit 12	Pembangunan Jalan	300	1,5	0,12
		Parit 13 Darat	Pembangunan Jalan	310	1,5	0,12
		Dusun Tani Maju	Pembangunan Jalan	250	1,25	0,12
4	Sebrang Pulau Kijang	Parit Ban	Pembangunan Jalan	230	1,5	0,12
		Prt. Jawa	Pembangunan Jalan	80	1	0,12
		Dusun Mekarjaya	Pembangunan Jalan	280	1,5	0,12

No	Desa	2015				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
5	Mekar Sari	Jl. Penyebrangan Prt. 18	Pembangunan Jalan	275	1,5	0,15
		Parit Buntu	Pembangunan Jalan	220	1	0,12
		Parit Tapai	Pembangunan Jalan	210	1	0,12
		Parit Sungai Terusan	Pembangunan Jalan	200	1	0,12
		Parit Sungai Tapai	Pembangunan Jalan	220	1	0,12
		Jl. Pendidikan	Pembangunan Jalan	65	2	0,12
		Parit Penyengat	Pembangunan Jalan	210	1	0,12
		Parit Baru Selayar	Pembangunan Jalan	210	1	0,12
		Parit H. Aris	Pembangunan Jalan	210	1	0,12
		Parit Pinang	Pembangunan Jalan	210	1	0,12
6	Sungai Undan	Dsn. Melati Indah	Pembangunan Badan Jalan	250	1	0,8
		Parit Lajer	Pembangunan Jalan	121	1	0,12
		Parit 2	Pembangunan Jalan	121	1	0,12
		Parit 3	Pembangunan Jalan	121	1	0,12
		Parit Senang	Pembangunan Jalan	300	1,5	0,12
		Jl. Utama	Pembangunan Jalan	100	1,5	0,12
7	Sungai Asam	Parit Idal Darat	Pembangunan Jalan	160	1	0,12
		Parit H. Ilyas	Pembangunan Jalan	160	1	0,12
		Parit Idal Lapis	Pembangunan Jalan	100	1	0,12
8	Sungai Mahang	Prt. Sekak-Prt. Tengah	Pembangunan Badan Jalan	500	2	0,7
		Parit Penghulu	Pembangunan Jalan	285	1,5	0,12
		Halaman Kantor Desa	Pembangunan Jalan	10	5	0,12
		Parit Lapis	Pembangunan Jalan	285	1,5	0,12
9	Sungai Terab	Parit Daeng Parani	Pembangunan Badan Jalan	1500	1,5	0,5
		Jl. Lintas-P.Kijang	Pembangunan Jalan	250	1,5	0,12
10	Tanjung Labuh	Parit Ban	Pembangunan Badan Jalan	500	2	0,7
		Jl. Pinguin	Pembangunan Badan Jalan	300	2	0,7
		Jl. Kenari	Pembangunan Jalan	140	1,5	0,12
		Parit 3	Pembangunan Badan Jalan	1000	2	0,7
		Parit Ban	Pembangunan Jalan	500	1,5	0,12

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Berdasarkan tabel 5.1. di atas pembangunan jalan pada tahun 2015 untuk Kecamatan Reteh telah dilakukan hampir seluruh desa di Kecamatan Reteh, hanya saja untuk Desa Pulau Ruku belum dapat melakukan kegiatan pembangunan jalan, Pembangunan jalan yang paling banyak di lakukan pada tahun 2015 berada pada Desa Mekar Sari yakni sebanyak 10 lokasi telah dilakukan pembangunan jalan.

Tabel 5.2. Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2016

No	Desa	2016				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
1	Sebrang Sanglar	RW. 02 Dusun Kamboja	Pembangunan Jalan	378	1,2	0,10
2	Pulau Kecil	Jl. Utama	Pembangunan Jalan	170	4	0,12
		Jl. Pendidikan	Pembangunan Jalan	150	3	0,12
		Parit 8	Pembangunan Jalan	300	1	0,12
		Parit 12	Pembangunan Jalan	300	1,5	0,12
		Parit 13	Pembangunan Jalan	97	1	0,12
3	Mekar Sari	Sungai Tapai	Pembangunan Jalan	125	1	0,10
4	Sebrang Pulau Kijang	Sungai Payung	Pembangunan Jalan	60	2	0,12
		Sungai Payung	Pembangunan Jalan	280	1,5	0,12
5	Sungai Undan	Parit Lajer	Pembangunan Jalan	200	1	0,10
		Jl. Menuju	Pembangunan Jalan	400	2	0,10
		Jl. Utama	Pembangunan Jalan	225	1,5	0,10
		Jl. Lancang Kuning	Pembangunan Jalan	125	1,5	0,10
		Jl. Pelabuhan	Pembangunan Jalan	125	1,5	0,10
		Parit 2	Pembangunan Jalan	150	1,5	0,10
		Parit Mangkidas	Pembangunan Jalan	150	1,5	0,10
		Parit Baru	Pembangunan Badan Jalan	420	1,5	0,10
Parit 3 Dusun Mayang Sari	Pembangunan Jalan	185	1	0,10		
6	Sungai Mahang	Lrg. Bunga Tanjung	Pembangunan Jalan	72	1,5	0,12

No	Desa	2016				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
7	Sungai Terab	Jl. Lintas Pulau Kijang	Pembangunan Jalan	650	1,5	0,10
		Prt. Dolah	Pembangunan Badan Jalan	600	2	0,10
		Prt. Bengkok	Pembangunan Badan Jalan	300	2	0,10
		Jl. Masjid	Pembangunan Badan Jalan	399	2	0,10
		Parit 1	Pembangunan Badan Jalan	200	1	0,10
		Prt. H. Samad	Pembangunan Badan Jalan	149	1	0,10
		Jl. Seroja	Pembangunan Jalan	100	1	0,10
8	Pulau Ruku	Dsn. Ka. Kerang Barat	Pembangunan Jalan	12	3	0,10
		Dsn. Ka. Kerang Barat	Pembangunan Jalan	18	2	0,10
		Dsn. Ka. Kerang Barat	Pembangunan Jalan	18	2	0,10
		Dsn. Ka. Kerang Barat	Pembangunan Jalan	30	1,5	0,10

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 untuk pembangunan jalan di dominasi pada Desa Sungai Undan yakni sebanyak 9 lokasi terdapat kegiatan pembangunan jalan dan ada beberapa desa tidak melakukan kegiatan Pembangunan Jalan yakni Desa Sanglar, Desa Sungai Asam dan Desa Tanjung Labuh. Sedangkan untuk Desa Pulau Ruku telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan, karena pada tahun 2015 tidak ada kegiatan dalam pembangunan jalan untuk Desa Pulau Ruku. Dan untuk Desa Sungai Terab masih dilakukannya pembangunan badan jalan untuk menambah lebar jalan sehingga dapat dilakukannya kegiatan pembangunan jalan.

Tabel 5.3. Program Pembangunan Jalan Kecamatan Reteh Tahun 2017

No	Desa	2017				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
1	Sanglar	Jl. Teras Jaya	Pembangunan Jalan	60	3	0,12
		Jl. A. Yani	Pembangunan Jalan	250	3	0,12
		Jl. Budi Utomo	Pembangunan Jalan	128	3	0,12
		Jl. Gajah Mada	Pembangunan Jalan	165	2	0,12
		Jl. RW Sumatra	Pembangunan Jalan	300	1	0,12
		Jl. RW Lurus	Pembangunan Jalan	160	1	0,12
2	Sebrang Sanglar	Rw 06 Dusun angrek	Pembangunan Jalan	100	1,5	0,12
		Dusun Dahlia	Pembangunan Jalan	150	1,5	0,12
3	Pulau Kecil	Parit 09	Pembangunan Jalan	700	1	0,10
		Parit 11	Pembangunan Jalan	750	1	0,10
		Parit 12 Jl. H.Ismail	Pembangunan Jalan	216	2	0,10
		Parit 12	Pembangunan Jalan	450	0,85	0,10
		Jalan Poros	Pembangunan Jalan	460	1	0,10
		Parit 13 Darat	Pembangunan Jalan	550	1	0,10
		Parit 13 Jl. H. Senin	Pembangunan Jalan	200	1	0,10
		Parit 15 Jl.Kuburan	Pembangunan Jalan	428	1	0,10
		Parit 15 Jl. Pemukiman	Pembangunan Jalan	50	1	0,10
		Parit 15 Jl. Industri	Pembangunan Jalan	105	1	0,10
		Parit 16	Pembangunan Jalan	300	1	0,10
4	Mekar Sari	Jl. Utama	Pembangunan Jalan	176	2	0,12
		Jl. Sei Terusan	Pembangunan Jalan	242	1	0,12
		Jl. Parit Buntu	Pembangunan Jalan	200	1	0,12
5	Sebrang Pulau Kijang	Dsn. Harapan Jaya	Pembangunan Jalan	469	1,5	0,12
6	Sungai Undan	Parit Mengkidas	Pembangunan Jalan	100	1	0,10
		Parit 03	Pembangunan Jalan	159	1	0,10
		Parit Ban	Pembangunan Jalan	40	1,4	0,10
		Desa	Pembangunan Badan Jalan	600	1,5	0,60
7	Sungai Asam	Parit Ainik	Pembangunan Jalan	150	1,5	0,12

No	Desa	2017		
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)

				P	L	T
8	Sungai Mahang	Prt Sekak	Pembangunan Jalan	131	1,5	0,12
		Prt Tengah	Pembangunan Jalan	300	1,5	0,12
		Prt Lapis	Pembangunan Jalan	200	1,5	0,12
		Prt Gantung	Pembangunan Jalan	200	1,5	0,12
		Prt Nasib	Pembangunan Badan Jalan	80	1,5	0,12
		Prt Penghulu	Pembangunan Badan Jalan	50	1,5	0,12
		Jl. Pendidikan	Pembangunan Badan Jalan	30	1,5	0,12
9	Sungai Terab	Parit Dolah	Pembangunan Badan Jalan	700	1,5	0,10
		Parit Ambo Tang	Pembangunan Badan Jalan	755	1,5	0,10
10	Tanjung Labuh	Parit 01	Pembangunan Jalan	750	1,5	0,10

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2017 kegiatan pambangunan di Kecamatan Reteh di dominasi pada Desa Pulau Kecil terdapat 12 lokasi pambangunan jalan.

Dapat dilihat dari tahun 2015 sampai 2017 pambangunan jalan di Kecamatan Reteh telah dilakukan dan dapat di katakan semua desa telah melakukan kegiatan pambangunan jalan. Hanya saja untuk desa yang berada pada bagian Hilir di Kecamatan Reteh seperti Desa Tanjung Labuh dan Pulau Ruku belum banyak melakukan pambangunan jalan, di karenakan kondisi untuk menuju desa untuk mendatangkan bahan bangunan melalui transportsi laut sehingga sulit untuk melakukan pambangunan jalan setiap tahun.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.1. Pembangunan Jalan di Desa Sungai Asam

5.1.1.2. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan di Kecamatan Reteh pada umumnya untuk menghubungkan antara parit dengan parit atau sungai dengan sungai yang ada di Kecamatan Reteh, pembangunan jembatan juga tidak lepas dari pembangunan jalan sehingga dilakukannya pembangunan jembatan untuk meningkatkan akses menuju desa dan Ibu Kota Kecamatan Reteh.

Pada Umumnya jembatan yang di buat di buat di Kecamatan Reteh untuk mendukung kendaraan roda 2 agar dapat melintasi parit-parit yang ada di Kecamatan Reteh. Selain pembangunan jembatan yang dilakukan di Kecamatan Reteh ada juga pembangunan jerambah yang berfungsi untuk aktifitas masyarakat di tepian sungai.

Tabel 5.4. Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2015

No	Desa	2015			
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)	
				P	L
1	Sanglar	Desa Sanglar	Pembangunan Jembatan	5	2
		Desa Sanglar	Jerambah Turun	30	1,5
2	Sebrang Pulau Kijang	Parit Ban	Pembangunan Jembatan	28	1,5
3	Sungai Undan	Parit Mengkidas	Pembangunan Jembatan	8	2
		Parit Wagu	Pembangunan Jembatan	20	2
		Desa Sungai Undan	Pembangunan Dermaga	35	1,5
		Dsn. Bagan Jaya	Pembangunan Jerambah	30	2
4	Sungai Asam	Parit Idal Hilir	Pembangunan Jembatan	46	1,5
		Ka. Sungai Asam	Pembangunan Jerambah	70	1,5
5	Sungai Terab	Parit Ambok Tang	Pembangunan Jembatan	35	2
6	Tanjung Labuh	Parit Ban	Pembangunan Jembatan	15	2
7	Pulau Ruku	Jl Menuju Kantor Desa	Pembangunan Jerambah	40	2
		Ka. Kerang Timur	Pembangunan Jerambah	27,5	2
		Dsn. Sinar Pelita	Pembangunan Jembatan	30	2

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Berdasarkan tahun 2015 untuk Program DMIJ dalam kegiatan pembangunan jembatan di Kecamatan Reteh telah dilakukan untuk 7 desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Reteh. Jembatan ini tidak terlalu banyak yang akan dilakukan pembangunan, karena jembatan hanya penghubung untuk dari parit ke parit yang tidak dapat dilakukan pembangunan jalan karena adanya aliran sungai yang terdapat di Kecamatan Reteh.

Tabel 5.5. Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2016

No	Desa	2016			
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)	
				P	L
1	Mekar Sari	Sungai Tapai	Pembangunan Jembatan	33	1,9
		Sungai Pinang	Pembangunan Jembatan	46	1,9
2	Sebrang Pulau Kijang	Dusun Mekarjaya	Pembangunan Jembatan	33	1,5

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada Tahun 2016 pembangunan jembatan dilakukan untuk 2 desa yang ada di Kecamatan Reteh yakni Desa Mekar Sari dan Desa Sebrang Pulau Kijang. Dalam penempatan untuk pembangunan jembatan harus sesuai dengan lokasi dan merupakan jembatan penghubung. Sehingga pembangunan jembatan tidak perlu banyak dilakukan. Akan tetapi harus sesuai dengan kondisi yang ada di desa.

Tabel 5.6. Program Pembangunan Jembatan Kecamatan Reteh Tahun 2017

No	Desa	2017			
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)	
				P	L
1	Sebrang Sanglar	Dusun Seroja	Pembangunan Jembatan	33	1,5
		Dusun Kamboja	Pembangunan Jembatan	45	1,5
2	Mekar Sari	Prt. H. Aris	Pembangunan Jembatan	47	1,9
		Prt. KPM	Pembangunan Jembatan	33	1,9
		Prt. Buntu	Pembangunan Rehab Lantai Jembatan	57	1,5
3	Sebrang Pulau Kijang	Prt Menanti II	Pembangunan Jembatan	51	1,9
4	Sungai Undan	Parit Lajer	Pembangunan Jembatan	29	1,9
		Parit 02	Pembangunan Jembatan	28	1,9
		Dusun Bagan Jaya	Pembangunan Jerambah	78	1,5
5	Sungai Asam	Parit Padamui	Pembangunan Jembatan	33	1,9
6	Sungai Terab	Jl. Masjid	Pembangunan Jembatan	20	1,5

No	Desa	2017			
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)	
				P	L
7	Tanjung Labuh	Parit 02	Pembangunan Jembatan	20	1,5
		Suak Labuh	Pembangunan Jembatan	15	1,5
		Perintis	Pembangunan Jembatan	8	1,5
		Depan Kantor Desa	Pembangunan Jembatan	5	1,5
8	Pulau Ruku	Dsn Kuala Kerang Timur	Pembangunan Jerambah	86	1,8

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Berdasarkan tabel 5.6. Pembangunan jembatan yang banyak dilakukan di Kecamatan Reteh berada pada desa Tanjung Labuh, sedangkan untuk Desa Sanglar, Desa Pulau Kecil dan Desa Sungai Mahang pada tahun 2017 tidak dilakukan pembangunan jembatan.

Pembangunan jembatan dan jerambah yang dilaksanakan di Kecamatan Reteh telah tepat pada sasaran. Dengan adanya Program DMIJ di Kabupaten Indragiri Hilir telah membantu masyarakat dalam mengusulkan bahwa akan dilaksanakan pembangunan jembatan dan pemerintah desa juga mengawasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.2. Pembangunan Jembatan di Desa Sungai Undan

5.1.1.3. Pembangunan Tanggul

Dalam Program DMIJ terdapat pembangunan tanggul yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir pada dataran di pinggir sungai. Kecamatan Reteh terdapat sungai gangsal. Dimana sungai tersebut dapat mengakibatkan banjir rob sehingga air yang ada di sungai dapat masuk ke permukiman warga yang ada di desa. Pengadaan tanggul sendiri di lakukan untuk mencegah banjir ke permukiman maupun ke lahan perkebunan masyarakat. Karena lahan perkebunan masyarakat merupakan salah satu perekonomian untuk masyarakat di Kecamatan Reteh. Sehingga untuk mencegah banjir yang terjadi pada desa yang ada di Kecamatan Reteh dapat di lakukan dengan pengadaan tanggul.

Tabel 5.7. Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2015

No	Desa	2015				
		Lokasi	Pembangunan	Volume (m)		
				P	L	T
1	Sungai Asam	Parit Tanik Rt. 02	Pengadaan Tanggul	200	1,5	0,6
		Parit Pademoi	Pengadaan Tanggul	300	1,5	0,6
		Parit Ainik	Pengadaan Tanggul	200	1,5	0,6
		Parit Raja	Pengadaan Tanggul	200	1,5	0,6
		Parit Parman	Pengadaan Tanggul	200	1,5	0,6
2	Sungai Mahang	Parit Nasib	Pengadaan Tanggul	750	2	0,7
		Parit Gantung	Pembangunan Bendungan	110	2	0,7
3	Sungai Terab	Jl. Lingkungan	Pengadaan Tanggul	200	1,5	0,5

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2015 pengadaan tanggul dilakukan pada Desa Sungai Asam dengan 5 lokasi, Desa Sungai Mahang 2 lokasi, dan Sungai Terab 1 Lokasi. Pengadaan tanggul ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa ataupun desa yang memiliki banjir rob paling tinggi sehingga di lakukan pengadaan tanggul di desa-desa yang sering terkena banjir akibat air pasang dari sungai yang ada di Kecamatan Reteh.

Tabel 5.8. Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2016

No	Desa	2016				
		Lokasi	Pembangunan	Volume		
				P	L	T
1	Sebrang Pulau Kijang	Parit Menanti	Pengadaan Tanggul	2000	2	1,20
2	Sungai Terab	Prt. Dolah	Pengadaan Tanggul	600	1,5	0,5
		Lingkungan Kantor Desa	Pengadaan Tanggul	180	2	0,60

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 pengadaan tanggul di lakukan hanya 2 desa di Kecamatan Reteh yakni Desa Sebrang Pulau Kijang dan Desa Sungai Terab. 2

desa yang melakukan pengadaan tanggul ini berada pada tepian sungai yang di Kecamatan Reteh.

Tabel 5.9. Program Pengadaan Tanggul di Kecamatan Reteh Tahun 2017

No	Desa	2017				
		Lokasi	Pembangunan	Volume		
				P	L	T
1	Sebrang Sanglar	Desa	Pengadaan Tanggul	1200	1,5	0,6
		Desa	Pengadaan Tanggul	300	1,5	0,6
2	Sebrang Pulau Kijang	Dsn Mekar Jaya	Pengadaan Tanggul	400	1,5	0,5
		Dsn Indah sari	Pengadaan Tanggul	1500	1,5	0,5
		Dsn Harapan Jaya	Pengadaan Tanggul	750	1,5	0,5
3	Sungai Asam	Parit Parman	Pengadaan Tanggul	110	2	0,7
		Prt Ajan - Prt H. Ilyas	Pengadaan Tanggul	200	2	0,7
4	Sungai Terab	Dsn. Karya Jaya	Pengadaan Tanggul	125	1,5	0,6
5	Pulau Ruku	Dsn Sinar Pelita	Pengadaan Tanggul	900	2	0,6

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Untuk pengadaan tanggul di Kecamatan Reteh dari tahun 2015 sampai tahun 2017 telah terdapat 7 desa yang melakukan pengadaan tanggul, sehingga ini dapat di artikan bahwa desa tersebut terkena banjir air pasang sungai. Sedangkan untuk 4 desa lainnya yakni Desa Sanglar, Desa Pulau Kecil, Desa Mekar Sari, dan Tanjung Labuh tidak melakukan pengadaan tanggul di karenakan desa tersebut tidak berada di pinggiran sungai.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.3. Pengadaan Tanggul di Desa Sungai Mahang

5.1.1.4. Pembuatan Sumur Bor

Pembuatan sumur bor dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Reteh. Karena kurangnya air bersih yang ada di Kecamatan Reteh dan masih banyak masyarakat yang bergantung pada air sungai terutama masyarakat yang tinggal pada tepian sungai di Kecamatan Reteh. Untuk itu perlu di lakukannya pembuatan sumur bor agar masyarakat dapat mendapatkan air bersih di desa mereka.

Tabel 5.10. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2015

No	Desa	2015		
		Lokasi	Pembangunan	Volume (Unit)
1	Pulau Kecil	Parit 15, 16 dan 17	Pembuatan Sumur Bor	3

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Untuk pembuatan sumur bor ini dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat desa. Untuk desa pulau kecil pada tahun 2015 telah melakukan

pembuatan sumur bor. Sedangkan untuk 10 desa lagi yang ada di Kecamatan Reteh belum melakukan pembuatan sumur bor.

Tabel 5.11. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2016

No	Desa	2016		
		Lokasi	Pembangunan	Volume (Unit)
1	Sungai Undan	Dusun Kuala Tengah	Pembuatan Sumur Bor	1
2	Pulau ruku	RT. 002 Dsn. Ka. Kerang Timur	Pembuatan Sumur Bor	1

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 hanya terdapat 2 desa yang melakukan pembuatan sumur bor ini yakni Desa Sungai Undan dan Desa Pulau Ruku. Pembuatan sumur bor ini belum tentu mampu menjangkau semua rumah tangga yang di desa tersebut, untuk itu masih perlu adanya penanganan terkait air bersih di Kecamatan Reteh.

Tabel 5.12. Program Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Reteh Tahun 2017

No	Desa	2017		
		Lokasi	Pembangunan	Volume (Unit)
1	Sanglar	Jl.Merdeka RT 03 RW 05	Pembuatan Sumur Bor	1
2	Pulau Ruku	Desa	Bak Penampungan Air	1

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Untuk melakukan pembuatan sumur bor di Kecamatan Reteh ini pada tahun 2015 sampai tahun 2017 hanya terdapat 4 desa yang melakukan pembuatan sumur bor yaitu sanglar, pulau kecil, sungai undan, dan pulau ruku. Pembuatan sumur bor ini biasanya dilakukan pada tempat-tempat sarana yang ada di Kecamatan Reteh. Sehingga tidak semua rumah tangga yang ada di desa

mendapatkan air bersih. Pembuatan sumur bor biasanya dilakukan untuk sarana keagamaan seperti musholla atau masjid yang membutuhkan air bersih untuk masyarakat dapat berwudhu.

5.1.1.5. Pembangunan Sarana Desa

Pembangunan sarana desa di Kecamatan Reteh dilakukan berdasarkan ketentuan Program DMIJ yang telah ditetapkan dan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan pemerintah lebih baik lagi. Sehingga pembangunan sarana desa dapat berupa pembangunan kantor desa dan pembangunan sosial seperti pembangunan kantor pelayanan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pembangunan sarana desa ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sarana yang masih kurang di desa-desa Kecamatan Reteh terutama pembangunan sarana untuk melayani masyarakat desa. Untuk dapat mengetahui pembangunan sarana yang telah dilaksanakan berdasarkan Program DMIJ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.13. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2015

No	Desa	2015	
		Lokasi	Pembangunan
1	Sanglar	Jl. Merdeka	Pembangunan Gapura / Gerbang
		Desa Sanglar	Pembangunan Kantor Pelayanan Kamtibmas
2	Sebrang Sanglar	Sebelah Kantor Desa	Pembangunan Gedung PAUD Cahaya Bunda
3	Pulau Kecil	Jl. Penunjang Prt.13	Pembangunan Kantor Desa
4	Sebrang Pulau Kijang	Sungai Payung	Kantor Pelayanan Kamtibmas
5	Sungai Terab	Desa Sungai Terab	Rehab Kantor Desa
		Halaman Kantor Desa	Semenisasi Halaman Kantor Desa
		Desa Sungai Terab	Kantor Pelayanan Kamtibmas
6	Pulau	Desa Pulau Ruku	Pembangunan Kantor Desa

	Ruku		
--	------	--	--

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Untuk tahun 2015 pembangunan sarana yang telah dilakukan berupa pembangunan gedung PAUD Cahaya Bunda yang di lakukan di Desa Sebrang Sanglar, sedangkan untuk pembangunan kantor desa terdapat pada Desa Pulau Kecil dan Desa Pulau Ruku.

Tabel 5.14. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2016

No	Desa	2016	
		Lokasi	Pembangunan
1	Sanglar	Kantor Desa Sanglar	Rehap Lantai Kantor Desa Sanglar
		Kantor Desa Sanglar	Pembangunan Plang Nama Kantor Desa
2	Sebrang Sanglar	Desa	Semenisasi Halaman Rumah Singgah Bersalin
3	Pulau Kecil	Halaman Kantor Desa	Semenisasi Halaman Kantor Desa
4	Sungai Asam	Parit Pademol	Rehab Berat Kantor Desa
5	Tanjung Labuh	Dusun Sinar Baru	Rehab Gedung Balai Pertemuan

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 untuk pembangunan sarana yang dilakukan di Kecamatan Reteh berupa seminisai halaman rumah singgah bersalin di Desa Sebrang Sanglar, pada Desa Tanjung Labuh di lakukan Rehab gedung balai pertemuan, dan untuk Desa Sungai Asam dilakukan Rehab berat kantor desa.

Tabel 5.15. Program Pembangunan Sarana Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2017

No	Desa	2017	
		Lokasi	Pembangunan
1	Sanglar	Sanglar	Pembangunan Kantin Desa
2	Sungai Undan	Jalan. H. Syahdan	Pembangunan Prasarana Olahraga
3	Sungai Mahang	Desa	Penyiapan Lahan Sarana Prasarana Olahraga
4	Tanjung Labuh	JL. Garuda	Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2017 telah di lakukan pembangunan sarana olahraga untuk 3 desa yaitu Desa Sungai Undan, Desa Sungai Mahang, dan Desa Tanjung Labuh. Pembangunan sarana desa ini di lakukan berdasarkan kebutuhan desa yang ada di Kecamatan Reteh. Sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat desa bahwa masyarakat membutuhkan pembangunan-pembangunan yang dapat mendukung kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran aktifitas masyarakat.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.4. Pembangunan Sarana Kantor Desa Pulau Ruku

5.1.2. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Dalam meningkatkan sumber daya manusia Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Program DMIJ. Dalam hal ini Program DMIJ terkait dalam bidang pembinaan masyarakat desa telah menetapkan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bidang pembinaan masyarakat desa ini terdiri dari Program Posyandu, Magrib Mengaji, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

5.1.2.1. Program Posyandu

Program posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu pada umumnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian pada bayi serta. Program posyandu ini sangat penting untuk dilakukan hal ini menyangkut kepada kesehatan untuk bayi. Untuk itu perlu diadakan Program posyandu ini di seluruh desa pada Kecamatan Reteh dengan jumlah posyandu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 5.16 Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2015

N0	NAMA DESA	Tahun 2015		
		INSETIF (Rp)	JUMLAH POSYANDU (Unit)	JUMLAH BAYI (Orang)
1	Seberang Sanglar	14.200.000	2	8
2	Sanglar	23.400.000	3	16
3	Mekarsari	14.400.000	3	20
4	Pulau Kecil	12.000.000	3	20
5	Seberang Pulau Kijang	6.000.000	1	5
6	Sungai Undan	12.000.000	4	20
7	Sungai Asam	7.200.000	1	6
8	Sungai Mahang	12.000.000	2	10
9	Sungai Terab	12.000.000	2	10
10	Tanjung Labuh	12.000.000	2	10
11	Pulau Ruku	6.000.000	1	5
TOTAL		131.200.000	24	130

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada Tabel 5.16 diatas program posyandu di seluruh desa di Kecamatan Reteh telah dianggarkan dana sebesar Rp. 131.200.000 Rupiah dan telah di berikan kepada tiap desa sesuai dengan kebutuhan desa tersebut dan banyaknya posyandu di desa serta jumlah bayi yang melakukan program posyandu yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya di Kecamatan Reteh.

Tabel 5.17 Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2016

N0	NAMA DESA	Tahun 2016		
		INSETIF (Rp)	JUMLAH POSYANDU (Unit)	JUMLAH BAYI (Orang)
1	Seberang Sanglar	14.400.000	2	10
2	Sanglar	24.800.000	3	16
3	Mekarsari	14.400.000	2	10
4	Pulau Kecil	24.000.000	2	10
5	Seberang Pulau Kijang	6.000.000	1	6
6	Sungai Undan	24.000.000	4	20
7	Sungai Asam	7.200.000	2	5
8	Sungai Mahang	12.000.000	2	10
9	Sungai Terab	12.000.000	2	10
10	Tanjung Labuh	12.000.000	2	10
11	Pulau Ruku	12.000.000	2	10
TOTAL		162.800.000	24	117

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 jumlah posyandu yang ada di Kecamatan Reteh yang terbanyak berada di desa Sungai Undan dengan jumlah posyandu sebanyak 4 (empat) dan jumlah bayi yang melaksanakan berjumlah 20 (dua puluh) orang. Dari keseluruhan yang melaksanakan program posyandu untuk program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh berjumlah 24 (dua puluh empat) unit posyandu dan untuk jumlah bayi sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang.

Sedangkan untuk anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing dengan total jumlah dana yang di berikan lebih besar dari pada tahun 2016 yaitu 162.800.000 Rupiah.

Tabel 5.18 Program Posyandu di Kecamatan Reteh Tahun 2017

N0	NAMA DESA	Tahun 2017		
		INSETIF (Rp)	JUMLAH POSYANDU (Unit)	JUMLAH BAYI (Orang)
1	Seberang Sanglar	18.000.000	3	15
2	Sanglar	24.800.000	3	19
3	Mekarsari	14.400.000	2	10
4	Pulau Kecil	24.000.000	2	10
5	Seberang Pulau Kijang	6.000.000	2	6
6	Sungai Undan	26.400.000	4	22
7	Sungai Asam	7.200.000	3	6
8	Sungai Mahang	12.000.000	2	10
9	Sungai Terab	6.000.000	2	10
10	Tanjung Labuh	12.000.000	2	10
11	Pulau Ruku	12.000.000	2	10
TOTAL		162.800.000	27	128

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2017 jumlah posyandu dan jumlah bayi meningkat dari tahun 2016 yakni jumlah posyandu menjadi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan untuk jumlah bayi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.5. Program Posyandu di Kecamatan Reteh

5.1.2.2. Program Magrib Mengaji

Gerakan masyarakat magrib mengaji atau disebut gemar mengaji adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca, dan memahami Al Qur'an pada waktu magrib baik di masjid, mushalla, langgar, dan surau atau di rumah.

Gerakan magrib mengaji bertujuan untuk membangkitkan kembali budaya mengaji di lingkungan masyarakat, memperkuat pemahaman nilai-nilai Al Qur'an sebagai tuntunan kehidupan masyarakat, mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama islam dan memberantas buta aksara Al Qur'an sehingga membentuk pribadi yang berakhlaqul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat, serta mewujudkan masyarakat dalam suasana aman, damai, harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya sesuai dengan misi daerah.

Tabel 5.19 Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2015

NO	NAMA DESA	Tahun 2015			
		ALOKASI ANGGARAN MAGHRIB MENGAJI (Rp)	JUMLAH TEMPAT MENGAJI (Unit)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	15.600.000	13	13	223
2	Sanglar	27.000.000	27	27	466
3	Mekarsari	10.800.000	6	6	96
4	Pulau Kecil	36.400.000	30	52	1.121
5	Seberang Pulau Kijang	12.600.000	7	7	45
6	Sungai Undan	8.400.000	7	7	77
7	Sungai Asam	23.400.000	13	13	149
8	Sungai Mahang	14.400.000	6	6	78
9	Sungai Terab	16.800.000	7	7	45
10	Tanjung Labuh	7.200.000	4	4	46
11	Pulau Ruku	7.200.000	6	6	110
TOTAL		179.800.000	126	148	2456

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tabel 2015 program magrib mengaji yang di adakan di Kecamatan Reteh dengan ada 11 (sebelas) desa yang ada memiliki jumlah tempat mengaji sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) dengan jumlah guru 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Sedangkan jumlah murid yang ikut melaksanakan program magrib mengaji sebanyak 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) orang.

Tabel 5.20 Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2016

N0	NAMA DESA	Tahun 2016			
		ALOKASI ANGGARAN MAGHRIB MENGAJI (Rp)	JUMLAH TEMPAT MENGAJI (Unit)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	46.800.000	13	13	223
2	Sanglar	97.200.000	27	27	466
3	Mekarsari	28.800.000	8	8	96
4	Pulau Kecil	104.400.000	29	29	1.121
5	Seberang Pulau Kijang	32.400.000	9	9	45
6	Sungai Undan	25.200.000	7	7	77
7	Sungai Asam	46.800.000	13	13	149
8	Sungai Mahang	21.600.000	6	6	78
9	Sungai Terab	25.200.000	7	7	45
10	Tanjung Labuh	10.800.000	3	3	46
11	Pulau Ruku	18.000.000	5	5	110
TOTAL		457.200.000	127	127	2.456

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 untuk jumlah murid masih tetap 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) orang dengan jumlah murid terbanyak berada di Desa Pulau Kecil berjumlah 1121 (seribu seratus dua puluh satu) orang dan jumlah

murid yang sedikit berada pada Desa Seberang Pulau Kijang dan Sungai Terab yakni masing-masing desa memiliki jumlah murid 45 (empat puluh lima) orang.

Tabel 5.21 Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh Tahun 2017

N0	NAMA DESA	Tahun 2017			
		ALOKASI ANGGARAN MAGHRIB MENGAJI (Rp)	JUMLAH TEMPAT MENGAJI (Unit)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	54.000.000	15	15	427
2	Sanglar	97.200.000	27	27	450
3	Mekarsari	28.800.000	8	8	103
4	Pulau Kecil	97.200.000	27	27	297
5	Seberang Pulau Kijang	32.400.000	9	9	190
6	Sungai Undan	32.400.000	9	9	201
7	Sungai Asam	46.800.000	13	13	149
8	Sungai Mahang	21.600.000	6	6	79
9	Sungai Terab	25.200.000	7	7	55
10	Tanjung Labuh	10.800.000	3	3	50
11	Pulau Ruku	18.000.000	5	5	93
TOTAL		464.400.000	129	129	2.094

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Untuk program magrib mengaji di tahun 2017 jumlah tempat mengaji berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) unit. Sedangkan untuk jumlah murid mengalami penurunan dari 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) orang menjadi 2094 (dua ribu sembilan puluh empat).



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.6. Program Magrib Mengaji di Kecamatan Reteh

5.1.2.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) adalah program untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indragiri Hilir dan membuat sarana untuk pendidikan anak usia dini tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan pembangunan sarana bertujuan agar setiap desa memiliki sarana pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 5.22 Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2015

NO	NAMA DESA	Tahun 2015		
		ALOKASI PAUD (Rp)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	10.000.000	8	57
2	Sanglar	10.000.000	10	55
3	Mekarsari	5.000.000	3	11
4	Pulau Kecil	15.000.000	8	45
5	Seberang Pulau Kijang	5.000.000	5	20
6	Sungai Undan	5.000.000	6	20
7	Sungai Asam	5.000.000	5	48
8	Sungai Mahang	5.000.000	6	22
9	Sungai Terab	10.000.000	7	46
10	Tanjung Labuh	5.000.000	5	15

11	Pulau Ruku	10.000.000	10	51
TOTAL		85.000.000	73	390

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting untuk dilakukan agar anak mendapatkan pendidikan yang tepat. Untuk itu pada Kecamatan Reteh sendiri telah merata distribusi tempat PAUD. Adapun jumlah murid pada tahun 2015 sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang dan jumlah guru yang sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

Tabel 5.23 Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2016

N0	NAMA DESA	Tahun 2016		
		ALOKASI PAUD (Rp)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	11.000.000	11	93
2	Sanglar	11.000.000	10	55
3	Mekarsari	5.500.000	3	11
4	Pulau Kecil	16.500.000	8	45
5	Seberang Pulau Kijang	5.500.000	5	20
6	Sungai Undan	11.000.000	6	20
7	Sungai Asam	5.500.000	5	29
8	Sungai Mahang	5.500.000	6	22
9	Sungai Terab	11.000.000	7	46
10	Tanjung Labuh	5.500.000	5	21
11	Pulau Ruku	5.500.000	5	37
TOTAL		93.500.000	71	399

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2016 jumlah murid meningkat menjadi 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan). Sedangkan untuk jumlah guru menurun dari 73 (tujuh puluh tiga) menjadi 71 (tujuh puluh satu). Untuk jumlah murid yang paling banyak berada pada Desa Sebrang Sanglar yaitu sebanyak 93 (sembilan puluh

tiga) orang dan untuk kumlah murid yang sedikit berada pada Desa Mekar sari yakni 11 (sebelas) orang.

Tabel 5.24 Program PAUD di Kecamatan Reteh Tahun 2017

NO	NAMA DESA	Tahun 2017		
		ALOKASI PAUD (Rp)	JUMLAH GURU (Orang)	JUMLAH MURID (Orang)
1	Seberang Sanglar	16.500.000	12	72
2	Sanglar	11.000.000	10	72
3	Mekarsari	5.500.000	2	14
4	Pulau Kecil	16.500.000	6	60
5	Seberang Pulau Kijang	5.500.000	5	13
6	Sungai Undan	11.000.000	8	15
7	Sungai Asam	5.500.000	5	24
8	Sungai Mahang	5.500.000	3	32
9	Sungai Terab	11.000.000	8	50
10	Tanjung Labuh	5.500.000	5	24
11	Pulau Ruku	5.500.000	5	47
TOTAL		99.000.000	69	423

Sumber : Fasilitator DMIJ Kecamatan Reteh, 2019

Pada tahun 2017 program PAUD memiliki jumlah murid sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) orang murid. Hal ini mengalami peningkatan jumlah murid PAUD dari tahun 2015 dan 2016 sebelumnya. Banyak orang tua mulai

mensekolahkan anak-anak mereka ke tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.7. Program PAUD di Kecamatan Reteh

5.2. Analisis Tingkat Partisipasi

5.2.1. Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan ukuran tingkat tangga partisipasi berdasarkan 8 tangga Sherry Arnstein yaitu sebagai berikut :

(1) Manipulasi (*Manipulation*); (2) Terapi/penyembuhan (*Theraphy*); (3) Informasi (*Informing*); (4) Konsultasi (*Consultation*); (5) Penentraman/perujukan (*Placation*); (6) Kerjasama (*Partnership*); (7) Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*); dan (8) Kontrol Masyarakat (*Citizen Power*).

Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam perencanaan ini di bagi dalam 4 (empat) variabel yang di gunakan antara lain : (1) Partisipasi kehadiran dalam musyawarah desa, (2) Partisipasi dalam mengemukakan masukan / saran/ usul, (3) partisipasi menetapkan konsep rencana, dan (4) partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.

5.2.1.1. Partisipasi Kehadiran dalam Musyawarah Desa

Untuk mengukur tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berdasarkan Suciati (2006) tangga partisipasi kehadiran dalam musyawarah desa berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 adalah sebagai berikut:

(1) Tidak hadir dalam musyawarah desa

- (2) Hadir dan memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah
- (3) Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat
- (4) Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah
- (5) Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan
- (6) Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah
- (7) Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana
- (8) Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dilakukan dapat dilihat hasil dari partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut tabel partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa.

Tabel 5.24. Partisipasi Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Tingkat Kehadiran dalam Musyawarah/ Rapat/Pertemuan Desa	Tidak hadir dalam musyawarah desa	22	22,45
2		Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja	12	12,24
3		Hadir dan mengemukakan yang dibutuhkan oleh masyarakat	31	31,63
4		Hadir dan Melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah	21	21,43
5		Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada yang direncanakan	7	7,14
6		Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah	5	5,10
7		Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	0	0
8		Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana	0	0
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa untuk melaksanakan program DMIJ Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, partisipasi masyarakat yang paling dominan adalah hadir dan mengemukakan yang dibutuhkan oleh masyarakat menjawab 31 orang (31,63%), masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah desa sebanyak 22 orang (22,45%), masyarakat yang menjawab hadir dan melakukan dialog/tanya dengan pemerintah 21 orang (21,43%), masyarakat yang hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada yang direncanakan 7 orang (7,14%), dan masyarakat hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah sebanyak 5 orang (5,10%). Sedangkan pada tingkat pelimpahan kekuasaan dan kontrol masyarakat tidak ada masyarakat ikut partisipasi pada tahap perencanaannya.

Tabel 5.25 Tingkatan Partisipasi Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Desa

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Dalam Variabel
1	Tingkat Kehadiran dalam Musyawarah/Rapat/Pertemuan Desa	Tidak hadir dalam musyawarah desa	22	22,45	1	22	288
2		Hadir dan memberikan masukan kepentingan pemerintah saja	12	12,24	2	24	
3		Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat	31	31,63	3	93	
4		Hadir dan Melakukan dialog /tanya jawab dengan pemerintah	21	21,43	4	84	
5		Hadir dan memberikan beberapa pengaruh yang direncanakan	7	7,14	5	35	
6		Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah	5	5,10	6	30	
7		Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	0	0	7	0	
8		Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana	0	0	8	0	
Jumlah			98	100		288	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan berdasarkan tabel di atas, dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Terdapat 1 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 8 pilihan dengan tiap skor terdiri dari 1 sampai 8. Sehingga dapat ditentukan minimum skor yang diperoleh tiap individu (1 x 1) adalah 1, sedangkan untuk maksimum skor tiap individu (1 x 8) adalah 8, dengan jumlah sampel 98 dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah (98 x 1 x 1) adalah 98 dan skor maksimal (98 x 1 x 8) adalah 784. Dengan diketahuinya minimum skor dan maksimum skor dapat diketahuinya interval yaitu $(784 - 98) / 8 = 85,75$. Maka tipologi dari Anstein dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah :

Tabel 5.26. Skoring Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan

No	Tingkat Partisipasi	Skoring
1	Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Power</i>)	698,25 - 784
2	Pelimpahan Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	612,49 - 698,24
3	Kerjasama (<i>Partnership</i>)	526,73 - 612,48
4	Penentraman/Perujukan (<i>Placation</i>)	440,97 - 526,72
5	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	355,21 - 440,96
6	Informasi (<i>Informing</i>)	269,45 - 355,20
7	Terapi/Penyembuhan (<i>Theraphy</i>)	183,69 - 269,44
8	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	98 - 183,68

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Pada tahap perencanaan tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa adalah 288 dengan tingkat partisipasi masyarakat termasuk

kategori tingkat informasi (*informing*). Informasi (*informing*) berada pada tangga ketiga dari delapan tangga Arnstein.

Tingkat informasi (*informing*) dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa adalah :

1. Masyarakat hanya dilibatkan untuk memperoleh informasi terkait program DMIJ yang akan dilaksanakan di desa tempat masyarakat bertempat tinggal.
2. Informasi (*informing*) termasuk dalam tingkat *Tokenism* yaitu masyarakat di perkanankan berpendapat dan menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk Program DMIJ, akan tetapi, masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
3. Pada tingkat informasi (*informing*) ini perubahan yang akan dilakukan masyarakat pada tahap perencanaan hanya memiliki sedikit kesempatan. Hal ini karena informasi yang diberikan pada akhir perencanaan.

5.2.1.2. Partisipasi dalam Mengemukakan Masukan/ Saran/ Usul

Tingkat partisipasi berikutnya adalah partisipasi masyarakat dalam mengemukakan masukan /saran /usul dengan mengacu kepada tangga Sherry Arnstein berdasarkan Suciati (2006) partisipasi dalam mengemukakan Masukan/ saran/usul dari tangga 1 sampai 8 adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak memberikan masukan/saran/usul
- (2) Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja

- (3) Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat
- (4) Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah
- (5) Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan
- (6) Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah
- (7) Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana
- (8) Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tabel 5.27. Partisipasi Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/Usul

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul.	Tidak memberikan masukan/saran/usul	22	22,45
2		Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja	7	7,14
3		Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat	20	20,41
4		Memberikan masukan dengan dialog dua arah dengan pemerintah	17	17,35
5		Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan	18	18,37
6		Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah	13	13,27
7		Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana	0	0
8		Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	1	1,02

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul sebagian besar responden tidak memberikan masukan/saran/usul sebanyak 22 orang (22,45%), kemudian memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat sebanyak 20 orang (20,41%), memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai kebutuhan sebanyak 18 orang (18,37%), memberikan masukan dengan cara

dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 17 orang (17,35%), memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah sebanyak 13 orang (13,27%), memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja sebanyak 7 orang (7,14%), memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana sebanyak 1 orang (1,02%). Tidak ada yang tingkat keaktifannya dalam mengemukakan masukan/saran/usul karena alasan memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana.

Tabel 5.28. Tingkat Partisipasi Keaktifan Mengemukakan Masukan/ Saran /Usul

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Dalam Variabel
1	Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul.	Tidak memberikan masukan/saran/usul	22	22,45	1	22	340
2		Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja	7	7,14	2	14	
3		Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat	20	20,41	3	60	
4		Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah	17	17,35	4	68	
5		Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan	18	18,37	5	90	
6		Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah	13	13,27	6	78	
7		Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana	0	0	7	0	
8		Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	1	1,02	8	8	
Jumlah			98	100		340	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tingkat partisipasi keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul memiliki jumlah skor 340, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat

Informing (informasi). *Informing* (informasi) berada pada tangga ketiga dari delapan tangga Arnstein.

Tingkat informasi (*informing*) dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan/saran/usul adalah :

1. Masyarakat hanya dilibatkan untuk memperoleh informasi terkait program DMIJ yang akan dilaksanakan di desa tempat masyarakat bertempat tinggal.
2. Informasi (*informing*) termasuk dalam tingkat *Tokenism* yaitu masyarakat di perkanankan berpendapat dan menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk Program DMIJ, akan tetapi, masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
3. Pada tingkat informasi (*informing*) ini perubahan yang akan dilakukan masyarakat pada tahap perencanaan hanya memiliki sedikit kesempatan. Hal ini karena informasi yang diberikan pada akhir perencanaan.

5.2.1.3. Partisipasi dalam Menetapkan Konsep Rencana

Tingkat partisipasi dalam menetapkan konsep rencana dengan mengacu kepada tangga Sherry Anstein berdasarkan Suciati (2006) adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
- (2) Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
- (3) Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.

- (5) Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
- (6) Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
- (7) Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
- (8) Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tabel 5.29. Partisipasi Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	Tidak ikut menetapkan konsep rencana	22	22,45
2		Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja	9	9,18
3		Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat	25	25,51
4		Berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana	21	21,43
5		Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana	8	8,16
6		Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah	10	10,20
7		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	2	2,04
8		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	1	1,02
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan keterlibatan dalam menentukan konsep rencana, sebagian besar responden ikut menetapkan konsep rencana karena untuk kepentingan masyarakat, sebanyak 25 orang (25,51%), tidak ikut menetapkan konsep rencana 22 orang (22,45%), Kemudian ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana sebanyak 21 orang (21,43%), ikut menetapkan konsep rencana dan saling

berbagi tanggung jawab dengan pemerintah 10 orang (10,20%), ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja 9 orang (9,18%), ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana 8 orang (8,16), Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana 2 orang (2,04%) dan Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana 1 orang (1,02%).

Tabel 5.30. Tingkat Partisipasi Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Dalam Variabel
1	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	Tidak ikut menetapkan konsep rencana	22	22,45	1	22	321
2		Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja	9	9,18	2	18	
3		Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat	25	25,51	3	75	
4		Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana	21	21,43	4	84	
5		Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana	8	8,16	5	40	
6		Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah	10	10,20	6	60	
7		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	2	2,04	7	14	
8		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	1	1,02	8	8	
Jumlah			98	100		321	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tingkat partisipasi keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana berjumlah 321, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat

Informing (informasi). *Informing* (informasi) berada pada tangga ketiga dari delapan tangga Arnstein.

Tingkat informasi (*informing*) dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menetapkan konsep rencana adalah :

1. Masyarakat hanya dilibatkan untuk memperoleh informasi terkait program DMIJ yang akan dilaksanakan di desa tempat masyarakat bertempat tinggal.
2. Informasi (*informing*) termasuk dalam tingkat *Tokenism* yaitu masyarakat di perkanankan berpendapat dan menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk Program DMIJ, akan tetapi, masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
3. Pada tingkat informasi (*informing*) ini perubahan yang akan dilakukan masyarakat pada tahap perencanaan hanya memiliki sedikit kesempatan. Hal ini karena informasi yang diberikan pada akhir perencanaan.

5.2.1.4. Partisipasi Memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Rencana

Tingkat partisipasi dalam memberikan persetujuan rancangan rencana yang mengacu pada tangga partisipasi Sherry Arnstein berdasarkan Suciati (2006) Partisipasi memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana dari tangga 1 sampai 8 adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak memberikan persetujuan.
- (2) Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.

- (3) Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah
- (5) Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat di perhatikan.
- (6) Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah
- (7) Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
- (8) Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tabel 5.31. Partisipasi Keterlibatan Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Rencana.

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	Tidak memberikan persetujuan	16	16,33
2		Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja	2	2,04
3		Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat	33	33,67
4		Memberikan persetujuan karena terjadi dialog dua arah dengan pemerintah	11	11,22
5		Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat di perhatikan	23	23,47
6		Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah	9	9,18
7		Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	4	4,08
8		Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	0	0
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana, Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat 33 orang (33,67%), kemudian Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat di

perhatikan 23 orang (23,47%), tidak memberikan persetujuan 16 orang (16,33%), Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah 9 orang (9,18%), Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan di keseluruhan rencana 4 orang (4,08%), Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja 2 orang (2,04%), dan tidak keterlibatannya dalam Memberikan persetujuan setelah di beri kekuasaan untuk melaksanakan, merencanakan dan mengawasi rencana.

Tabel 5.32. Tingkat Partisipasi Keterlibatan Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Rencana.

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Dalam Variabel
1	Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	Tidak memberikan persetujuan	16	16,33	1	16	360
2		Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja	2	2,04	2	4	
3		Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat	33	33,67	3	99	
4		Memberikan persetujuan karena terjadi dialog dua arah dengan pemerintah	11	11,22	4	44	
5		Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat di perhatikan	23	23,47	5	115	
6		Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah	9	9,18	6	54	
7		Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana	4	4,08	7	28	
8		Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	0	0	8	0	
Jumlah			98	100		360	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tingkat partisipasi keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana berjumlah 360, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Konsultasi). *Consultation* (Konsultasi) berada pada tangga ke empat Arnstein.

Tingkat *Consultation* (Konsultasi) bahwa tingkat partisipasi keterlibatan masyarakat dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat sebagai langkah penting untuk menuju partisipasi penuh dari masyarakat.
2. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat, dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
3. Meskipun telah terjadi dialoh dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.
4. Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) ini masih termasuk kedalam *Tokenism* atau berada pada partisipasi sedang, dimana tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan untuk berpendapat, akan tetapi masyarakat tidak mendapat jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.

5.2.1.5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Keseluruhan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program DMIJ di Kecamatan Reteh dapat diketahui dengan menjumlahkan skor tiap variabel sebagaimana diuraikan diatas, yaitu variabel partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam mengemukakan masukan/saran/usul, partisipasi masyarakat dalam menetapkan konsep rencana,

dan partisipasi masyarakat dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana. Hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.33. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh

No	Variabel	Jumlah Skor Variabel	Keterangan Tingkat
1	Partisipasi kehadiran dalam musyawarah atau rapat desa	228	<i>Informing</i> (Informasi)
2	Partisipasi dalam Mengemukakan Masukan/saran/usul.	340	<i>Informing</i> (Informasi)
3	Partisipasi dalam menetapkan konsep rencana.	321	<i>Informing</i> (Informasi)
4	Partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.	360	<i>Consultation</i> (Konsultasi)
Jumlah		1249	<i>Informing</i> (Informasi)

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan Tabel 5.33 diatas, dapat di perhitungkan sebagai berikut :

Terdapat 4 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 8 pilihan dengan tiap skor terdiri dari 1 sampai 8. Sehingga dapat ditentukan minimum skor yang diperoleh tiap individu (4×1) adalah 4, sedangkan untuk maksimum skor tiap individu (4×8) adalah 32, dengan jumlah sampel 98 dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah ($98 \times 4 \times 1$) adalah 392 dan skor maksimal ($98 \times 4 \times 8$) adalah 3136.

Dengan diketahuinya minimum skor dan maksimum skor dapat diketahuinya interval yaitu $(3136 - 392) / 8 = 343$. Maka tipologi dari Arnstein dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah :

Tabel 5.34. Skoring Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan Keseluruhan

No	Tingkat Partisipasi	Skoring
1	<i>Citizen Power</i> (Kontrol Masyarakat)	2793-3136
2	<i>Delegated Power</i> (Pelimpahan Kekuasaan)	2450-2792
3	<i>Partnership</i> (Kerjasama)	2107-2449
4	<i>Placation</i> (Penentruman/Perujukan)	1764-2106
5	<i>Consultation</i> (Konsultasi)	1421-1763
6	<i>Informing</i> (Informasi)	1078 – 1420
7	<i>Theraphy</i> (Terapi/Penyembuhan)	735 – 1077
8	<i>Manipulation</i> (Manipulasi)	392 – 734

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Total Skor dari semua variabel partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah 1249, maka secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Informing* (Informasi) yakni tangga ketiga dari delapan tangga Arnstein.

Tingkat informasi (*informing*) dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menetapkan konsep rencana adalah :

1. Masyarakat hanya dilibatkan untuk memperoleh informasi terkait program DMIJ yang akan dilaksanakan di desa tempat masyarakat bertempat tinggal.

2. Informasi (*informing*) termasuk dalam tingkat *Tokenism* yaitu masyarakat di perkanankan berpendapat dan menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk Program DMIJ, akan tetapi, masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
3. Pada tingkat informasi (*informing*) ini perubahan yang akan dilakukan masyarakat pada tahap perencanaan hanya memiliki sedikit kesempatan. Hal ini karena informasi yang diberikan pada akhir perencanaan.

Sedangkan bila dilihat dari variabelnya, maka partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana mencapai jumlah tertinggi (360) dan yang paling rendah adalah partisipasi kehadiran dalam musyawarah atau rapat desa dengan jumlah terendah (228).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir berada pada tingkat ketiga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat informasi (*informing*). Pada tingkat informasi (*informing*) ini termasuk dalam partisipasi sedang yakni berada dalam derajad tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*.

5.2.2. Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir digunakan kategori

tingkatan partisipasi menurut Arnstein yaitu: (1) tingkatan partisipasi rendah (*Nonparticipation*), (2) Tingkatan Partisipasi Sedang (*Tokenism*), dan (3) Tingkatan Partisipasi Tinggi (*Citizen Power*).

Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pelaksanaan di bagi dalam 3 (tiga) variabel yang di gunakan antara lain : (1) Partisipasi dalam bentuk uang atau benda, (2) Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide, (3) Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong).

5.2.2.1. Partisipasi dalam Bentuk Uang atau Benda

Partisipasi dalam bentuk uang atau benda yang di berikan masyarakat selama pelaksanaan pembangunan DMIJ yaitu merupakan bantuan dana yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan dari Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program DMIJ. Dimana bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didukung berupa uang atau benda adalah merupakan suatu upaya yang sangat nyata, maka untuk itu pemerintah desa harus bijak dalam mempergunakan anggaran-anggaran bantuan dana pembangunan, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda dapat diberikan skala partisipasi yaitu : (1) Tidak ada memberikan uang

atau benda, (2) Memberikan uang atau benda, dan (3) memberikan uang atau benda dan melakukan gotong royong.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan dapat dilihat hasil dari partisipasi dalam bentuk uang atau benda dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut tabel partisipasi dalam bentuk uang atau benda :

Tabel 5.35. Persentase Penilaian Partisipasi Uang atau Benda

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Partisipasi dalam bentuk uang atau benda.	Tidak ada memberikan uang atau benda.	17	17,3
2		Memberikan uang atau benda	22	22,5
3		Memberikan uang atau benda dan melakukan gotong royong	59	60,2
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan partisipasi dalam bentuk uang atau benda yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Reteh dalam pelaksanaan Program DMIJ adalah tidak ada memberikan uang atau benda 17 orang (17,3%), partisipasi masyarakat dalam memberikan uang atau benda 22 orang (22,5%), dan masyarakat yang memberikan uang atau benda serta ikut dalam melaksanakan gotong royong berjumlah 59 orang (60,2%). Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda lebih banyak masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan di desa memberikan benda seperti dalam melaksanakan pembangunan sumor bor masyarakat memberikan benda dalam bentuk pipa. Selain itu, dalam melakukan pembangunan masyarakat juga ikut bergotong royong.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.36. Nilai Skor Tingkat Partisipasi Uang atau benda

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	Nilai Skor
1	2	3	4	5	6	4 x 6
1	Partisipasi dalam bentuk uang atau benda.	Tidak ada memberikan uang atau benda	17	17,3	1	17
2		Memberikan uang atau benda	22	22,5	2	44
3		Memberikan uang atau benda dan melakukan gotong royong	59	60,2	3	177
Jumlah			98	100		238

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Penentuan tingkat partisipasi dalam bentuk uang atau benda dapat dilihat dalam perhitungan sebagai berikut :

Terdapat 1 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 3 pilihan dengan jumlah skor berkisar 1 sampai 3. Sehingga dapat ditentukan skor minimum dari setiap individu adalah (1 x 1) adalah 1, dan skor maksimum dari setiap individu adalah (1 x 3) adalah 3 dengan jumlah sampel 98. Dengan demikian dapat diketahuinya minimum skor partisipasi dalam pelaksanaan adalah (98 x 1 x 1) adalah 98 dan maksimal skor (98 x 1 x 3) adalah 294.

Dengan diketahuinya skor maksimal dan skor minimum dapat diketahui interval untuk menentukan tingkatan partisipasi yaitu $(294 - 98) / 3 = 65$. Dengan tingkatan partisipasi dalam pelaksanaan dapat diketahui yaitu :

Tabel 5.37. Skoring Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan

No	Tingkatan	Skoring
1	Rendah (<i>Nonparticipation</i>)	98-163
2	Sedang (<i>Tokenism</i>)	164-229
3	Tinggi (<i>Citizen Power</i>)	230-294

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dengan demikian bila total skor dari variabel tingkat partisipasi dalam bentuk uang atau benda adalah 238, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat partisipasi tinggi (*Citizen Power*). Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda berada pada tingkat partisipasi yang tinggi dalam melaksanakan program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam melaksanakan Program DMIJ masyarakat desa paling banyak melaksanakan partisipasi dalam bentuk uang atau benda adalah masyarakat memberikan uang atau benda dan melakukan gotong royong dalam pelaksanaan Program DMIJ terutama dalam pembangunan tanggul dan pembuatan sumur bor. Dikarenakan dalam melaksanakan pembangunan tanggul ini masyarakat ikut terlibat dalam gotong royong secara langsung.

5.2.2.2. Partisipasi dalam Bentuk Pikiran atau Ide

Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan dalam upaya pencapaian Program DMIJ di Kecamatan Reteh dalam pelaksanaan yang telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda yang biasanya di sampaikan dalam musyawarah Program DMIJ di Kecamatan Reteh.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide dapat diberikan skala partisipasi yaitu : (1) Tidak memberikan ide, (2) Memberikan ide untuk kebutuhan masyarakat, dan (3) Memberikan ide dan melakukan kerjasama dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan dapat dilihat hasil dari partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut tabel partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide :

Tabel 5.38. Persentase Penilaian Partisipasi Pikiran atau Ide

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide.	Tidak ada memberikan ide	15	15,3
2		Memberikan ide untuk kebutuhan masyarakat	59	60,2
3		Memberikan ide dan melakukan kerjasama dalam pembangunan.	24	24,5
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil dari partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide dalam melaksanakan Program DMIJ di Kecamatan Reteh adalah masyarakat tidak ada memberikan ide 15 orang (15,3%), masyarakat yang memberikan ide untuk kebutuhan masyarakat adalah 59 orang (60,2%), dan masyarakat yang memberikan ide dan melakukan kerjasama dalam pembangunan menjawab 24 orang (24,5%).

Banyak masyarakat yang menjawab memberikan ide untuk kepentingan masyarakat seperti dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yakni pada program magrib mengaji. Dimana, dalam pelaksanaannya masyarakat desa mempunyai ide untuk membuka tempat mengaji di rumah-rumah guru ngaji yang di laksanakan setelah sholat magrib. Ide masyarakat muncul secara langsung ketika pelaksanaan program DMIJ ini dilaksanakan.

Adapun tingkat partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.39. Nilai Skor Tingkat Partisipasi Pikiran atau Ide

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	Nilai Skor
1	2	3	4	5	6	4 x 6
1	Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide.	Tidak ada memberikan ide	15	15,3	1	15
2		Memberikan ide untuk kebutuhan masyarakat	59	60,2	2	118
3		Memberikan ide dan melakukan kerjasama dalam pembangunan.	24	24,5	3	72
Jumlah			98	100		205

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dengan demikian tingkat partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide memiliki jumlah skoring 205, maka tingkat partisipasi dalam bentuk pikiran atau

ide termasuk pada kategori tingkat partisipasi sedang (*Tokenism*). Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide lebih banyak masyarakat yang memberikan ide untuk kebutuhan masyarakat desa di Kecamatan Reth dalam melaksanakan Program DMIJ.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide ini memang penting untuk pembangunan desa. Dimana, masyarakat sendirilah yang mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk desanya sendiri. Untuk menampung ide-ide atau gagasan yang dimunculkan oleh masyarakat ini telah dilaksanakan musyawarah dalam bentuk Masyarakat Desa Prioritas Usulan (MDPU) selama pelaksanaan Program DMIJ di Kabupaten Indragiri Hilir.

5.2.2.3. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga (Gotong Royong)

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan Program DMIJ berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong merupakan adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu kegiatan yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong royong) masyarakat memiliki skala partisipasi yaitu : (1) Tidak ikut dalam gotong royong, (2) Ikut melaksanakan gotong royong, dan (3) Ikut melaksanakan gotong royong serta mengawasi pembangunan.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan dapat dilihat hasil dari partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) masyarakat dalam pelaksanaan

Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut tabel partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong).

Tabel 5.40. Persentase Penilaian Partisipasi Tenaga (Gotong Royong)

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%
1	Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong).	Tidak ikut dalam gotong royong	24	24,5
2		Ikut melaksanakan gotong royong	39	39,8
3		Ikut melaksanakan gotong royong serta mengawasi pembangunan.	35	35,7
Jumlah			98	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong royong) berdasarkan hasil dari penelitian adalah masyarakat yang tidak ikut dalam gotong royong 24 orang (24,5%), masyarakat yang ikut melaksanakan gotong royong 39 orang (39,8%), dan masyarakat yang ikut melaksanakan gotong royong serta mengawasi pembangunan Program DMIJ 35 orang (35,7%).

Adapun tingkat partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) dalam pelaksanaan Program DMIJ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.41. Nilai Skor Tingkat Partisipasi Tenaga (Gotong Royong)

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	Nilai Skor
1	2	3	4	5	6	4 x 6
1	Partisipasi	Tidak ikut dalam	24	24,5	1	24

	dalam bentuk tenaga (gotong royong).	gotong royong				
2		Ikut melaksanakan gotong royong	39	39,8	2	78
3		Ikut melaksanakan gotong royong serta mengawasi pembangunan.	35	35,7	3	105
Jumlah			98	100		207

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong royong) pada pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Rete memiliki skoring 207, yakni banyak masyarakat yang ikut melaksanakan gotong royong. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong royong) berada pada tingkat partisipasi sedang (*Tokenism*). Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) ini sudah banyak masyarakat yang ikut melaksanakan gotong royong. Akan tetapi, masyarakat lebih banyak mengikuti gotong royong saja tanpa mengawasi pelaksanaan dalam pembangunan di desa.

Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) yang paling sering dilaksanakan oleh masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan seperti gotong royong untuk pembuatan tanggul serta dalam pembangunan jalan atau jembatan di desa yang sulit untuk masuk bahan baku seperti semen dan pasir. Masyarakat banyak membantu melakukan gotong royong dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan pembangunan di desa.



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2019

Gambar 5.8. Masyarakat desa Sungai Mahang Melakukan Gotong Royong

5.2.2.4. Partisipasi dalam Pelaksanaan Keseluruhan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ di Kecamatan Reteh yaitu dengan cara menjumlahkan dari setiap skor yang diperoleh dari sub variabel di atas. Partisipasi dalam bentuk uang atau benda, partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide, dan partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong). Hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program DMIJ secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.42. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh

No	Variabel	Jumlah Skor Variabel	Keterangan Tingkat Partisipasi
1	Partisipasi dalam bentuk uang atau benda.	238	Partisipasi Tinggi
2	Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide	205	Partisipasi Sedang
3	Partisipasi dalam tenaga (gotong royong)	207	Partisipasi Sedang
Jumlah		650	Partisipasi Sedang

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Penentuan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Terdapat 3 sub variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban kuisisioner adalah 3 pilihan dengan jumlah skor berkisar 1 sampai 3. Sehingga dapat ditentukan skor minimum dari setiap individu adalah (3×1) adalah 3, dan skor maksimum dari setiap individu adalah (3×3) adalah 9 dengan jumlah sampel 98. Dengan demikian dapat diketahui minimum skor partisipasi dalam pelaksanaan adalah $(98 \times 3 \times 1)$ adalah 294 dan maksimal skor $(98 \times 3 \times 3)$ adalah 882.

Dengan diketahuinya skor maksimal dan skor minimum dapat diketahui interval untuk menentukan tingkatan partisipasi yaitu $(882 - 294) / 3 = 196$. Dengan tingkatan partisipasi dalam pelaksanaan dapat diketahui yaitu :

Tabel 5.43. Skoring Tingkatan Partisipasi dalam Pelaksanaan Keseluruhan

No	Tingkatan	Skoring
1	Rendah (<i>Nonparticipation</i>)	294-489
2	Sedang (<i>Tokenism</i>)	490-686
3	Tinggi (<i>Citizen Power</i>)	687-882

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Bila dilihat dari variabelnya, maka partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan yang berada pada partisipasi tinggi adalah partisipasi dalam bentuk uang atau benda (238) dan untuk partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide serta partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) berada pada partisipasi sedang.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir berada pada tingkat partisipasi sedang. Dimana masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa terutama dalam melakukan gotong royong untuk

pembangunan di desa. Akan tetapi, masyarakat tidak ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap masing-masing tujuan yang ingin dicapai dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program DMIJ yang sudah terlaksana di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terbagi dalam 2 (dua) bidang pembangunan desa, yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari pembangunan jaringan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan tanggul, pembuatan sumur bor, dan pembangunan sarana desa. Sedangkan, untuk pembinaan masyarakat desa terdiri dari program posyandu, program magrib mengaji, dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yakni partisipasi kehadiran dalam musyawarah atau rapat desa berada pada tingkat informasi dengan skoring 228, partisipasi dalam mengemukakan masukan/saran/usul berada pada tingkat informasi dengan skoring 340, partisipasi dalam dalam menetapkan konsep rencana berada pada tingkat informasi dengan skoring 321, dan partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana berada pada tingkat konsultasi dengan skoring 360. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan memiliki skoring 1249 yakni berada pada tingkat ketiga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat informasi (*informing*). Suatu tingkat dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yakni Partisipasi dalam bentuk uang atau benda berada pada tingkatan partisipasi tinggi dengan skoring 238, partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide berada pada tingkat partisipasi sedang dengan skoring 205, dan partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong) berada pada tingkat partisipasi sedang dengan skoring 207. Untuk tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pelaksanaan Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir memiliki skoring 650 yakni berada pada tingkat partisipasi sedang. Dimana masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa terutama dalam melakukan gotong royong untuk pembangunan di desa. Akan tetapi, masyarakat tidak ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembenahan terhadap Program DMIJ di Kecamatan Reteh agar pencapaian untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan.
2. Pemerintah daerah Kecamatan Reteh lebih menggiatkan lagi sosialisasi terkait Program DMIJ kepada perangkat-perangkat desa beserta masyarakat desa setempat, terutama sosialisasi untuk membuat masyarakat hadir dalam musyawarah atau rapat desa dalam penyusunan rencana kerja desa.
3. Masyarakat desa di Kecamatan Reteh untuk meningkatkan lagi partisipasi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan di desa. Terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan hasil dan dalam tahap evaluasi Program DMIJ di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2002), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bintaro. (1977), *Geografi Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- David, K. (1990), *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Edi, S. (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Irene, Siti. (2011), *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Mardalis. (2008), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mikkelsen, B. (1999), *Metode Penelitian Partisipator dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi.
- Muta'ali, Lutfi. (2013), *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. BPFUGM. Yogyakarta.
- _____. (2016), *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keruangan)*. BPFUGM. Yogyakarta.
- Santoso, S. (1986), *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Holil, S. (1980), *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- Serakan, Uma. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, Y. (1993), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Universitas Sebelas Maret : Surakarta.

Dokumen

Al Qur'an dan Terjemahan Edisi Ilmu Pengetahuan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2018). *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2017). *Kecamatan Reteh Dalam Angka 2017*.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Resume Desa Maju Inhil Jaya (2014) Kabupaten Indragiri Hilir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi/Jurnal

Amalia, Ayu. (2015), *Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir* [Skripsi]. Pekanbaru: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau.

Mupid, Sukran. (2016), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju* [Tesis]. Pekanbaru: Magister Ilmu Administrasi, Universitas Riau.

Mwiru, M.N. (2015), *THE Importance Of Community Participation In Development Projects At Local Level* [Disertasi]. *Local Government and Management (LGM) of Mzumbe University*.

- Teesen, G. (Tanpa Tahun), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurung Barat Kabupaten Minahasa Selatan*. [Skripsi]. Manado: Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi.
- Tumbel, Satria M. (Tanpa Tahun), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. [Tesis]. Manado: Pengembangan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi.
- Suciati. (2006), *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati* [Tesis]. Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
- Syariffuddin. (2015), *Peranan Program Desa Maju Inhil Jaya Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Guna Percepatan Pembangunan di Desa Gemilang Jaya*. Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indragiri.
- Yendri, Yulfi. (2015), *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pedesaan Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Pangkalan Batang Barat Kabupaten Bengkalis* [Skripsi]. Pekanbaru: Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Riau